BADAN POM



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV
TAHUN 2021



Balai Besar POM di Surabaya
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya - 60286
Telepon : 031-5020575, 5048833
email : bpom_surabaya@pom.go.id

1500533 HALOBPOM

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan IV merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan IV yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV tahun 2021.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan IV Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan IV terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Surabaya, 20 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI SURABAYA

Dra. Rustiawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Pada tanggal 17 Desember 2021 telah dilaksanakan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra yang telah dilaksanakan oleh BPOM, sehingga terdapat perubahan nomenklatur dan jumlah indikator menjadi 30 indikator. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh semua sasaran strategis memperoleh capaian "BAIK".

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,62% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 96,53% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 96,99% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 106,84% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,11% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
- Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 97,82% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektiftas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 105,74% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 100,08%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan sebesar 87,78%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 106,21%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 102,88% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan IV tahun 2021 antara 87,98% sampai dengan 120,41%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan", sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan".

Pada triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 1 (Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 45,856,819,000,-. Realisasi anggaran hingga triwulan IV tahun 2021 adalah Rp. 45,834,343,279,- atau 99,95%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA BADAN POM

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**3**
IKHTISAR EKSEKUTIF		**5**
DAFTAR ISI		**7**
DAFTAR GAMBAR		**8**
DAFTAR TABEL		**9**
BAB I PENDAHULUAN		**10**
1.1.	*Gambaran Umum Organisasi*	*10*
1.2.	*Struktur Organisasi*	*11*
1.3.	*Aspek Strategis Organisasi*	*13*
1.4.	*Analisis Lingkungan Strategis*	*14*
1.5.	*Isu Strategis*	*16*
BAB II PERENCANAAN KINERJA		**22**
2.1.	*Rencana Strategis*	*22*
2.2.	*Perjanjian Kinerja Tahun 2021*	*24*
2.3.	*Kriteria Pencapaian Indikator*	*27*
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		**30**
3.1.	*Capaian Kinerja Organisasi*	*30*
3.2.	*Realisasi Anggaran*	*104*
3.3.	*Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*	*105*
BAB IV PENUTUP		**108**
4.1.	*Kesimpulan*	*108*
4.2.	*Saran*	*109*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya.....11
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM.....15
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur 16
Gambar 4. Visi dan Misi.....22
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 23
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator.....27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 24
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 26
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021 30
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 31
Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021 33
Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II tahun 2021 35
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan II tahun 2021 36
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2021 38
Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan II Tahun 2021 42
Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021 47
Tabel 12. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2021 49
Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan II Tahun 2021 52
Tabel 14. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi 56
Tabel 15. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan II 58
Tabel 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan 60
Tabel 17. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 64
Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 66
Tabel 19. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan II Tahun 2021 69
Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Triwulan II Tahun 2021 72
Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021 74
Tabel 22. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan II tahun 2021 76
Tabel 23. Jumlah desa pangan aman triwulan II tahun 2021 79
Tabel 24. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan II tahun 2021 82
Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021 84
Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2021 86
Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan II tahun 2021 88
Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021 91
Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 94
Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP 94
Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021 95
Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 97
Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan II tahun 2021 99
Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan II tahun 2021 102
Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya triwuan II tahun 2021 103
Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan 106

BAB I PENDAHULUAN

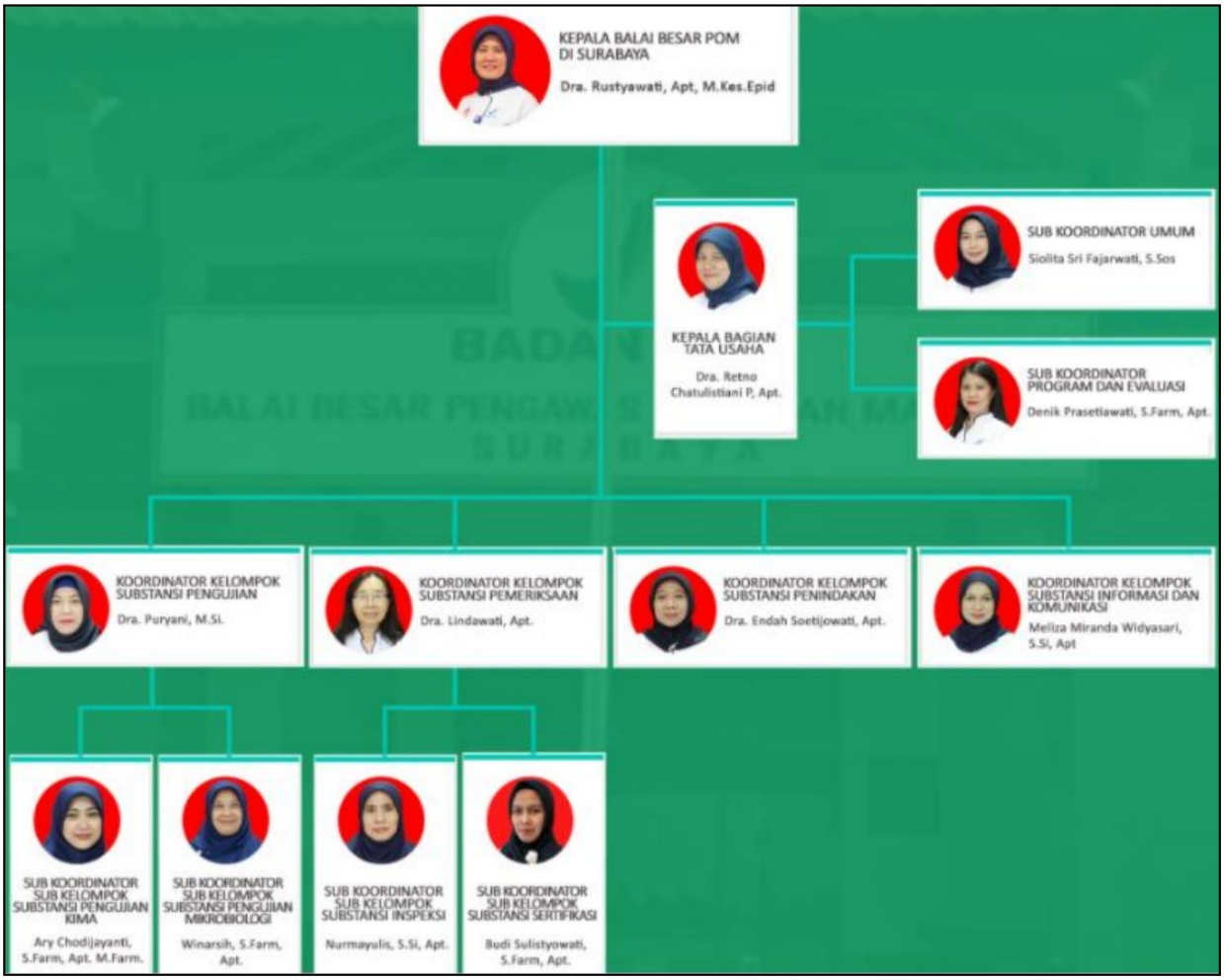
1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektlitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

   Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

   a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
   b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

   Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

   a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
   b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
   c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
   d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
   e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
   f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
   g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
   h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

   Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

   a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
   b. Subkelompok substansi umum; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektlitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 136 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	52	50	12	12

Sumber Daya Lainnya

a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m^2 dan luas bangunan 4.496,09 m^2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Satu-satunya UPT Badan POM yang mempunyai Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2005, namun laboratorium ini ditiadakan per September 2021
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.

- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), mengalami revisi DIPA karena penghematan dan penambahan belanja pegawai hingga menjadi Rp. 45,856,819,000,-. (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

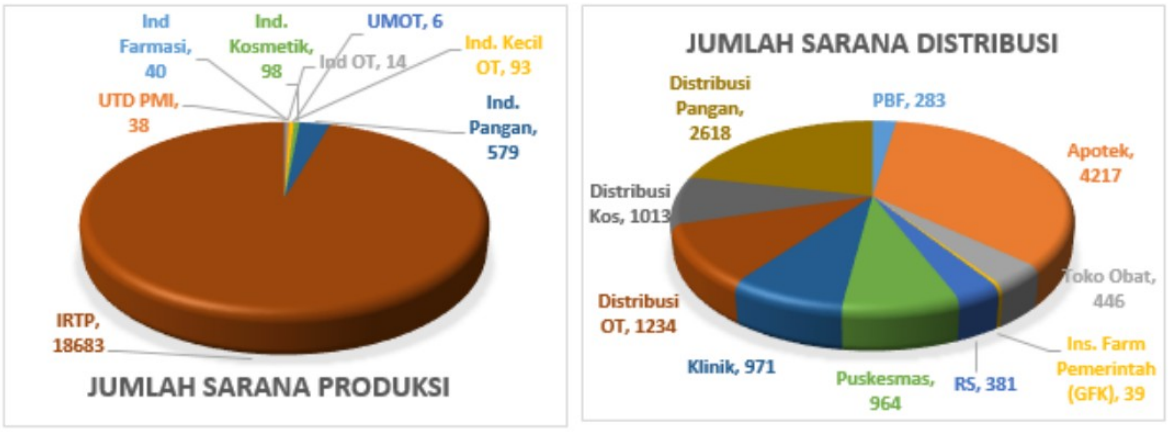
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111^0 hingga 114^{0}4' Bujur Timur dan 7^{0}12' hingga 8^{0}48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km^2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain: :

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

   Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

   Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

   BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa

pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal *(*tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa*)*. Untuk itu, penertiban peredaran produk illegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk

perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 514 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2020 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Rakyat) Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SITUPAI (Sistem Telusur Uji Pihak 3) yaitu layanan yang terdapat di website www.bbpomsurabaya bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga

diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sertifikasi dan Registrasi) berupa Layanan yang terdapat di website www.bbpomsurabaya.com bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM berupa QnA dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit ke sarana.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor

ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantrenpreuner oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

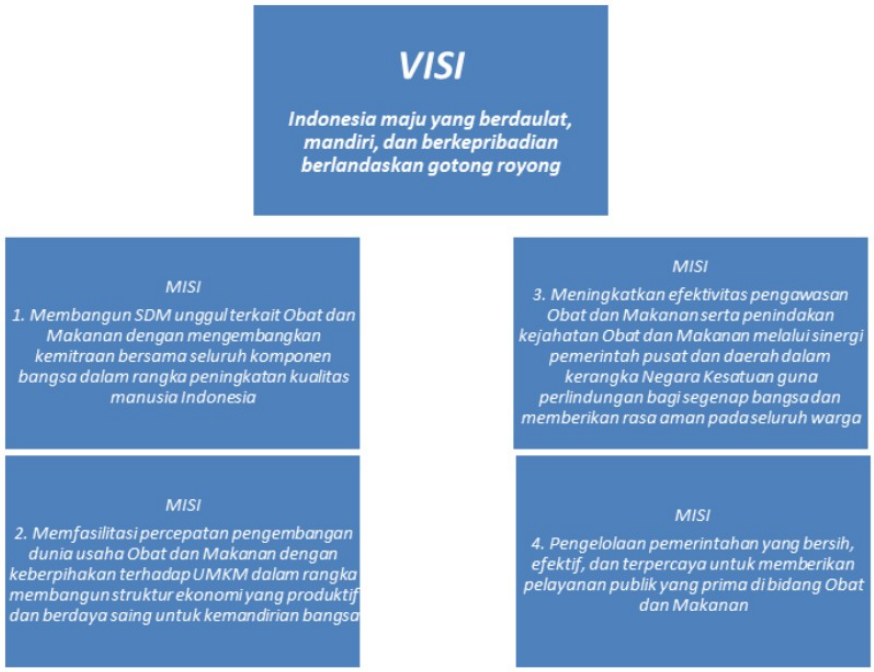
Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui desktop inspection, pelayanan publik dilakukan melalui online, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on-call menggunakan sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Seiring dengan semakin meningkatnya penderita covid 19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai diseluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun *new all record* untuk melaporkan hasil uji sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan BBPOM di Denpasar dengan total 2.913 sampel hingga akhir tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2021-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



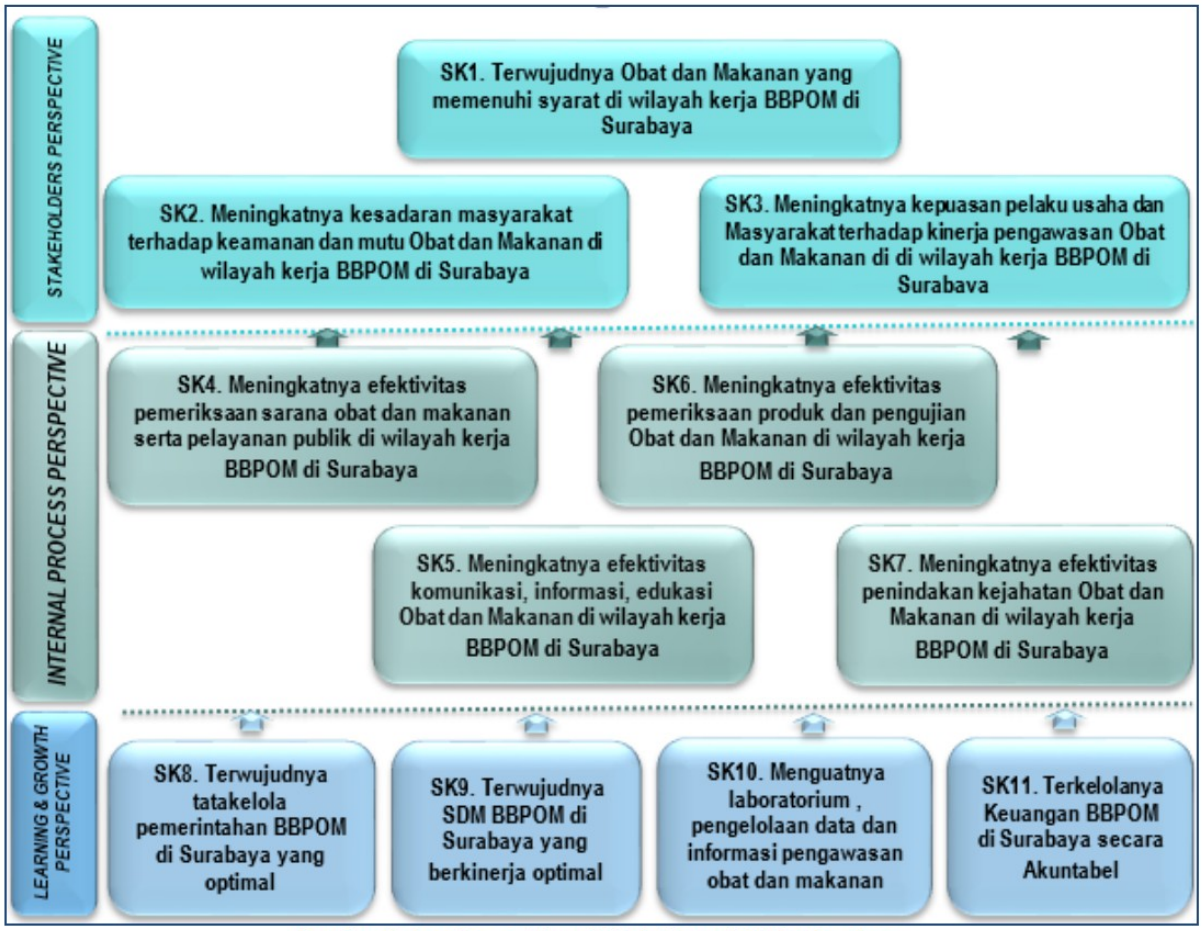
Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektle dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024.

Pada tanggal 17 Desember 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 30 indikator

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Dengan adanya Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya, maka mengakibatkan adanya revisi pada PK tahun 2021 dari 29 indikator menjadi 30 indikator dengan jumlah anggaran sebesar Rp45.856.819.000,- (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) sebagai berikut :

Tabel 2. Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,64
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
		Indeks Pelayanan Publik	4,35
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	55%
5	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12
6	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
7	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	84,7
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	82,6
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,26
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	93,4
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan

target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dengan adanya revisi pada PK 2021 juga akan merubah RAPK 2021, sebagai berikut

Tabel 3. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	91,00%	438.494.345
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80%	221.977.410
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6	83.6	83.6	84%	104.869.156
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	70%	117.437.590
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				88%	39.543.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	112.248.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	83,6	56.500.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	75,64	239.914.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90	38.858.000
4	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89%	43.412.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	62%	22.214.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	98%	551.554.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	55%	283.983.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	60%	535.753.000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4,35	38.858.000
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	-	-	55%	129.682.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
5	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91,1	6.373.832.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	440.980.000
		Jumlah desa pangan aman	10%	25%	45%	19	598.928.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15%	25%	60%	12	315.280.000
6	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	100%	543.363.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	100%	339.415.000
7	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65%	1.102.868.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	84,7	25.063.587.000
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	82,6	1.027.592.000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	12.982.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	78	6.725.274.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2,26	330.940.000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	93,4	3.240.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	3.240.000

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkalai dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan dlerifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan IV atau akhir tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya, sebanyak 11 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). NPS dari 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	107,62%	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	96,53%	Baik
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	96,99%	Baik
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	106,84%	Baik
5.	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100,11%	Baik
6.	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	97,82%	Baik
7.	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	105,74%	Baik
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	100,08%	Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	97,78%	Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	106,21%	Baik

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	102,88%	Baik

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 30 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	CAPAIAN TW IV
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%	88,27%	97%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	85,14%	106,42%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	86,73%	103,25%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	84,29%	120,41%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88%	97,69%	111,01%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76	73,36	96,53%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,6	84,5	101,08%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,64	66,55	87,98%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	91,72	101,91%
4	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	98,91%	111,14%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	65,04%	104,90%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98%	99,20%	101,23%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	57,47%	104,49%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	70,36%	117,26%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	CAPAIAN TW IV
		Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,52	103,91%
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	55%	57,73%	104,97
5	Meningkatnya efektlitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,51	100,45%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42	100,00%
		Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12	12	100,00%
6	Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,30%	96,30
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	99,34%	99,34
7	Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65%	68,73%	105,74%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	84,7	84,64	99,93%
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	82,6	82,79	100,23%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85	83,11	97,78%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78	80,1	102,69%
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,26	2,48	109,73%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	93,4	90,66	97,07%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	92	100,00	108,70%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat **1 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori "**tidak dapat disimpulkan**", **1 indikator** dengan kategori "**sangat baik**", dan **28 indikator** mencapai target dengan kriteria "**baik**". Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan IV sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	91.00 %	88.27 %	97 %	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 1270 sampel acak Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1121 sampel MS (memenuhi syarat) dan 149 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021 **belum mencapai target** yaitu 97% namun sudah memperoleh kriteria "**Baik**".

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 97% (Baik). Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di triwulan IV oleh Balai Besar POM di Surabaya dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi covid 19 yang belum berakhir.

- Jumlah total sampel obat acak sampai triwulan IV Balai Besar POM di Surabaya adalah 1270 sampel. Sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 149 sampel yang terdiri dari 89 sampel obat, 10 sampel obat tradisional, dan 50 sampel kosmetik.
- Dari 149 sampel yang tidak memenuhi ketentuan di triwulan IV, sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 85 sampel, 2 sampel obat kadaluarsa dan 2 sampel obat tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan. Sampel obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 5 sampel, 4 sampel Tanpa Izin Edar (TIE) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Sampel Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 42 sampel, 1 sampel kosmetika tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian dan tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 7 sampel Tanpa Izin Edar.
- Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV dipengaruhi oleh kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).
- Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di daerah/kabupaten) sudah diatur di Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021, dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu produk secara keseluruhan.
- Pada indikator persentase obat yang memenuhi syarat, terdapat reviu target pada saat Reviu Renstra 2020-2024, yaitu dari 83,6% menjadi 91%, sehingga terdapat penurunan capaian.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Melakukan intervensi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin ke sarana agar konsisten dalam menerapkan GMP (Good Manufactured Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya, mengingat sampel yang tidak memenuhi syarat penandaan mencapai 88,59% dari seluruh sampel acak yang tidak memenuhi syarat.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80 %	85,14 %	106,42 %	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 646 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BBPOM di Surabaya, terdapat 550 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 96 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur sampai triwulan IV tahun 2021 **sudah mencapai target** yaitu 106,42% dengan kriteria "**Baik".**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai triwulan IV telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 106,42% (Baik). Pelaksanaan sampel Acak Makanan di triwulan IV dilaksanakan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic Covid-19 ini.

- Jumlah total sampel acak sampai triwulan IV sebanyak 646 sampel yang masuk laboratorium pengujian telah selesai dilakukan pengujian. Dari 646 sampel yang diuji , sebanyak 550 sampel Memenuhi Syarat dan sebanyak 96 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari 70 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan (TMK), 20 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Uji laboratorium dan sebanyak 6 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Penandaan dan uji laboratorium.
- Dari 70 TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) Penandaan terdiri dari 7 TMK Penandaan Mayor (tidak mencantumkan kode produksi, kadaluwarsa, berat bersih dan desain label tidak sesuai yang disetujui) dan 63 TMK Penandaan Minor (tidak mencantumkan kode produksi).
- Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sampai triwulan IV ini dipengaruhi oleh semakin meningkatkan kepatuhan produsen/pelaku usaha dalam penerapan CPPOB (Cara Pembuatan Pangan Olahan Yang Baik) baik pada proses produksi maupun pada pelabelan produk yang sesuai dengan ketentuan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

BBPOM di Surabaya akan tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB dan akan meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84 %	86,73%	103,25 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang

dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 550 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 477 sampel memenuhi syarat (MS) dan 73 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan IV tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 103,25 % dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisonal, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan secara on site dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan. Realisasi sampling targeted sampai TW IV yang diperiksa dan diuji sebanyak 550 sampel, dengan hasil 477 sampel MS dan 73 sampel yang TMS. Sampel yang TMS terdiri dari sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik. Dari 18 sampel obat yang TMS, terdapat 13 sampel TMK Penandaan, 3 sampel TMS Hasil Uji laboratorium dan 2 sampel obat kadaluwarsa. Dari 13 sampel obat tradisonal yang TMS, terdapat 9 sampel TMK Penandaan, 3 TMS hasil uji laboratorium dan 1 sampel TMS Hasil Uji dan Penandaan. Dari 42 sampel kosmetik yang TMS, terdapat 36 sampel TMK Penandaan dan 6 sampel TMS hasil uji.

Meskipun ada perubahan target sebagai hasil dari Reviu Renstra 2020-2024 yaitu dari 83,6% menajdi 84%, namun realisasi presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan IV masih dapat mencapai target. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin baik, antara lain sarana distribusi dan pelayanan telah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanan dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen terkait suhu dan kelembaban sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta saryanfar tetap di tingkatkan agar penerapaan aspek GMP, distribusi dan penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuian penandaan.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70 %	84,29%	120,41 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai TW IV diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 350 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 295 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 55 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 120,41 % dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Realisasi Sampling Targeted sampai TW IV sebanyak 350 sampel yang masuk laboratorium telah selesai diuji. Sampai TW IV terdapat sampel 350 Targeted. Dari 350 sampel targeted yang diuji tedapat 55 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji.
- Sampel targeted yang disampling sampai TW IV terdiri dari sampel minuman beralkohol, AMIU, Lab. Air, Ruang Lingkup Kimia, Ruang Lingkup Mikrobiologi, Pemahit Formalin, Kemasan Pangan, Kasus, Lokal Spesifik, DNA Babi, UMKM dan PJAS.
- Dari 188 sampel PJAS yg diuji sampai TW IV terdapat 4 sampel TMS Kimia Mikro, 10 sampel TMS Kimia, 31 sampel TMS Mikro dan sebanyak 143 yang MS (Memenuhi Syarat). Sesuai dengan perubahan DO dari PJAS Sekolah maka area sampling menjadi lebih luas tidak hanya di kantin sekolah. Sampling PJAS dilakukan 3 tahap dan pada TW III dilakukan sampling tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 1 dilakukan di Kota Surabaya, masih berlaku PPKM di Jawa Timur dan belum ada PTM (Pembelajaran Tatap Muka) sehingga sampling dilakukan di lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal yang dapat diakses. Pada tahap 2 dilakukan di kota Surabaya dab Kabupaten Sidoarjo, walaupun masih dalam kondisi PPKM terdapat daerah yang mulai memberlakukan PTM terbatas, namun pada saat sampling kantin sekolah masih tutup karena PTM dibatasi hanya 2 jam sehingga sampling kembali dilakukan di sekitar sekolah dan rumah tinggal. Pedagang yang ditemui tidak selalu pedagang yang menetap namun juga pedagang keliling. Pasar konsumen mereka juga tidak hanya anak sekolah tetapi juga masyarakat umum namun kategori pangan yang djual memenuhi kategori pangan PJAS. Selain itu sesuai dengan pedoman maka sampling dapat pula dilakukan terhadap produk pangan olahan. Pada tahap 3 dilakukan pada bulan Oktober di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Mojokerto.
- Hasil pengujian menunjukkan sebagian besar TMS mikro yang erat hubungannya dengan sanitasi hygiene.
- Terdapat tren penurunan hasil TMS terhadap sampel PJAS mulai tahun 2018 terhadap bahan berbahaya seperti boraks dan formalin, Tahun 2019 terdapat 38 sampel positif boraks, tahun 2020 hanya ada 1 sampel positif boraks dan di tahun 2021 sampai dengan tahap 2 sampling PJAS (Sampilng PJAS dilakukan sebanyak 3 tahap) tidak ditemukan sampel pentol/bakso dan sejenisnya yang mengandung boraks. Hal ini disebabkan adanya intervensi dari BBPOM Surabaya kepada pelaku usaha untuk menggunakan bahan pengganti boraks.

- Telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 di Desember 2021 dengan memisahkan pangan fortifikasi dari sampling targeted menjadi indikator sendiri yaitu Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, sehingga capaian di TW IV sangat berbeda dengan capaian di TW I hingga TW III.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021 dengan hasil 153,37%, TW II dengan hasil 191,82 % dan TW III 179,66 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan, maka dilakukan reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 dengan menaikkan target dari 51% menjadi 70%. BBPOM di Surabaya tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB dan tetap meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88 %	97,69%	111,01 %	Sangat Baik

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Pangan fortifikasi MS = (Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS dibagi Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Hasil pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi persentase makanan fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan sampai TW IV diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 130 sampel fortifikasi pangan yang dilakukan oleh BBPOM di

Surabaya dengan hasil 127 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 3 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) hasil uji. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 111,01 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

d. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi Sampling Fortifikasi sampai TW IV sebanyak 130 sampel yang masuk laboratorium dan telah selesai diuji. Sampel Fortifikasi tepung disampling di Kabupaten Gresik sesuai dengan pedoman sampling. Sampling dilkakukan dilakukan di pasa-pasar di kecamatan yang rawan stunting menurut data dari Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Produk yang disampling adalah produk yang banyak beredar di pasar-pasar tersebut dan dari hasil sampling yang didapat bahwa produk terigu tersebut dari pabrik yang memiliki rekam jejak yang baik sehingga hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan fortifikasi pada tepung terigu. Sampling fortifikasi garam beryodium dan minyak goreng sawit dilaksakan di sarana peredaran.

Dari 130 sampling Fortifikasi yang disampling yang terdiri dari 85 sampel garam beryodium, 25 minyak goreng sawit dan 20 sampel tepung terigu. Dari 130 sampel fortifikasi yang diuji terdapat 29 sampel TMK Penandaan, 3 sampel yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pengujian dan TMK Penandaan yaitu sampel minyak goreng sawit dan 127 sampel Memenuhi Syarat (MS).

e. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra 2020-2024, maka diterbitkan Reviu Renstra BBPOM di Surabaya dengan menambahkan indikator presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat untuk pengawalan terhadap pangan fortifikasi dan upaya pengurangan stunting.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76	73,36	96,53	Baik

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah indlidu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

Pada triwulan IV tahun 2021 telah diperoleh hasil survey pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dari 460 orang responden sebesar 73,36.

Capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 96,53% namun sudah mendapat kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Berdasarkan hasil survey kesadaran (awareness) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021 didapatkan bahwa indeks pengetahuan adalah 74,53; indeks sikap 77,13 dan indeks perilaku adalah 68,42. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 79,26 (Baik); Obat Tradisional 75,51 (Baik); Suplemen Kesehatan 76,30 (Baik); Kosmetik 76,88 (Baik); Pangan Olahan 77,64 (Baik).

Dari hasil survey diketahui bahwa masyarakat pada umumnya telah mempunyai pengetahuan yang baik terhadap petunjuk penyimpanan dan tanggal kadaluwarsa produk Obat dan Makanan, namun pengetahuan tentang produk yang tidak terdaftar masih sangat rendah. Secara umum masyarakat telah memiliki sikap yang sangat baik terhadap kemasan yang masih bagus, efek samping, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, terdaftar di BPOM dan mengetahui tanggal kadaluwarsa. Perilaku masyarakat juga cenderung mengalami peningkatan terhadap aspek membeli produk dengan kemasan baik, membaca informasi label/kemasan produk, mengginakan produk sesuai dengan aturan pakai, menyimpan produk sesuai informasi pada label, dan membaca informasi kadaluwarsa, namun terjadi penurunan perilaku masyarakat dalam membeli produk yang terdaftar di BPOM (mempunyai NIE).

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 80,40 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 73,70. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan

peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu. Selama Triwulan IV tahun 2021 BBPOM Surabaya tetap melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat. Selain KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota DPR RI, BBPOM Surabaya juga melaksanakan kegiatan KIE bersama instansi lain atau Perguruan Tinggi misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta beberapa Perguruan Tinggi misalnya Universitas Airlangga, Universitas Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Midya Mandala, dll. Selama Triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan 51 kali kegiatan KIE bersama stakeholder/lintas sektor tersebut. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, Pelatihan DFI, Pendampingan UMKM, dll.

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Selama triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.451 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review. Jika dibandingkan dengan Triwulan III sejumlah 1.224 layanan maka terjadi kenaikan jumlah layanan yang diberikan sebanyak 227 layanan. Selama masa PPKM masyarakat sudah beberapa kali menghubungi ULPK BBPOM di Surabaya agar diijinkan berkonsultasi secara langsung. Namun karena aturan dari Satgas Covid agar tidak menerima tamu di kantor, maka BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan namun dengan tagline "Anda

Menanyakan Kami Menjawab". Selama triwulan IV tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 5 kali yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain Pendaftaran Pangan Olahan versi Baru, Legalitas Obat Tradisional, dan Label pada Pangan Olahan.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama Triwulan IV BBPOM Surabaya telah menayangkan 243 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor. Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui media elektronik sebanyak 3 kali selama triwulan IV tahun 2021 yaitu melalui sms blast dan videotron milik Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada Triwulan IV tahun 2021, BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan sumber informasi dan hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. *Community Empowerment will induce Voluntary Compliance*.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil survey Kesadaran Masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 didapatkan hasil Indeks Kesadaran Masyarakat Propinsi Jawa Timur berturut turut sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah 68,78 ; 73,23 dan 73,36. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi kenaikan indeks kesadaran masyarakat yang sangat kecil (tidak signifikan). Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilaksanakan secara daring dan tidak ada tatap muka langsung dengan masyarakat. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat selama pandemi covid 19 mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Dari survey Kesadaran masyarakat, aspek sikap dan perilaku masyarakat yang harus diwaspadai adalah tentang membeli produk yang memiliki NIE (Nomor Izin Edar) Badan POM. Hal ini perlu digali lebih lanjut apakah masyarakat memang tidak mengetahui atau tidak peduli karena kondisi ekonomi, yang penting mereka dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu produk yang akan dikonsumsi. BBPOM di Surabaya harus mewaspadai hal ini dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa membeli produk yang legal dan memiliki NIE Badan POM akan menghindarkan mereka dari bahaya dan risiko terhadap kesehatan baik risiko jangka pendek maupun jangka Panjang. Selain itu agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal dan memanfaatkan situasi pandemi dan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. BBPOM di Surabaya harus tetap mengirimkan signal kepada para pelaku usaha bahwa setiap tindakan kejahatan Obat dan Makanan akan ditindak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BBPOM Surabaya akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama BBPOM Surabaya dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Yang masih harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). BBPOM Surabaya akan menggandeng beberapa instansi swasta untuk bersama sama memberikan edukasi kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,6	84,5	101,08	Baik

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : 1) Aspek bimbingan dan pembinaan; 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; 3) Aspek penanganan saran dan masukan; 4) Aspek manfaat; 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; serta 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Pada triwulan IV tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan 202 responden, yaitu 84,5.

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,08% dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan IV, BBPOM di Surabaya melaksanakan kegiatan *Desk* Pra-Registrasi Pangan Olahan yang bertujuan mempersiapkan pelaku usaha pangan untuk mengikuti kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha dibimbing agar dapat mempersiapkan persyaratan sesuai ketentuan pendaftaran di e-reg.pom.go.id. sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat.

Terkait obat tradisional, BBPOM di Surabaya mengadakan kegiatan *Desk CAPA* CPOTB pada triwulan IV. Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha obat tradisional yang dalam proses pemenuhan perbaikan hasil pemeriksaan CPOTB Bertahap dapat berkonsultasi kepada petugas sehingga pemenuhan perbaikan dapat lebih cepat dan tepat sehingga Surat Keterangan Pemenuhan Aspek (SKPA) CPOTB Bertahap dapat diterbitkan.

Dari kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Hasil survey telah diperoleh di akhir triwulan IV.

Selain itu, petugas BBPOM di Surabaya terlibat dalam kegiatan *Desk CAPA* CDOB yang diadakan oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Badan POM. Bertujuan untuk mempercepat pemenuhan perbaikan terhadap sertifikasi CDOB yang telah dilakukan, pelaku usaha dibimbing sehingga dapat memberikan perbaikan secara tepat.

Pendampingan perbaikan sarana dan dokumentasi terhadap UMKM pangan yang belum memenuhi ketentuan CPPOB, melalui kegiatan Gempur Jatim proses seleksi maupun proses mandiri, juga tetap dilakukan di triwulan IV.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya memperoleh total skor 10 (kategori A). Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik, petugas BBPOM di Surabaya melakukan berbagai upaya, di antaranya:

- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat
- menyediakan format dokumen terkait pendaftaran pangan olahan

- mengadakan kegiatan *desk CAPA* CPOTB untuk menunjang percepatan pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap
- menyediakan format dokumen terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam menyiapkan dokumen yang sesuai
- selalu mengirimkan *link* Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelaku usaha agar dapat diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas BBPOM di Surabaya.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,64	66,55	87,98	Cukup

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsleness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsleness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada triwulan IV tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan nilai 66,55.

Capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 87,98% dengan kriteria **Cukup.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat untuk Propinsi Jawa Timur 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut: 69,78 pada tahun 2019, 74,18 pada tahun 2020 dan 66,55 pada tahun 2021. Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi indeks penurunan kepuasan masyarakat yang sangat signifikan. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung tidak dimungkinkan selama masa pandemic Covid 19. Selama triwulan IV tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.704 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan). Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan berbagai materi pemberian informasi sesuai dengan permintaan stakeholder. Selama Triwulan IV tahun 2021, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 51 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll. Topik yang disampaikan antara lain Keamanan Pangan, Tata Cara Registrasi Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pangan Keperluan Gizi Khusus, Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik UMKM, Pedoman Pemberian SPP IRT, CDOB, Praktek Kefarmasian, Peraturan Perapotikan, Pengelolaan Obat dan Napza di sarana pelayanan kefarmasian, Berizinan Berbasis Risiko, dan e Sertifikasi, dll.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik terutama di masa pandemi covid 19 ini, BBPOM Surabaya telah melahirkan sebuah inovasi Cangkru'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. Cangkru'an biasanya dilakukan di pos ronda, warung kopi, taman, atau tempat tempat berkumpul masyarakat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. BBPOM Surabaya mengadop konsep Cangkru'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru'an ini mendapat

sambutan yang sangat menggembirakan dari masyarakat pelaku usaha maupun yang baru akan memulai berusaha. Selama Triwulan IV, BBPOM Surabaya telah melaksanakan 5 kali kegiatan Cangkru'an dengan jumlah peserta 25 sampai 40 orang tiap kali kegiatan. Topik yang disampaikan pada kegiatan Cangkru'an antara lain adalah: Tata cara Registrasi Pangan Olahan versi Baru, Label pada Pangan Olahan, Obat Tradisional, dan Anda Menanyakan Kami Menjawab.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2021 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait perizinan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dapat dimungkinkan menjadi penyebab menurunnya Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikoordinasikan melalui system OSS membuat beberapa aplikasi milik BPOM yang selama ini telah berlangsung harus disesuaikan dan mengalami beberapa perubahan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun petugas pelayanan publik BPOM terutama di UPT yang berhadapan langsung dengan masyarakat pelaku usaha.

Berdasarkan hasil survey, aspek reliability yaitu kepuasan atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM merupakan aspek yang terendah, terutama pada katagori Obat Tradisional dan Kosmetik.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Upaya meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan berbagai inovasi dan upaya melalukan efisiensi tanpa mengabaikan efektifitas pencapaian tujuan. Masyarakat yang puas dan bahagia merupakan tujuan akhir pelayanan publik dan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya. Berbagai media dan fasilitas yang tersedia baik milik instansi pemerintah lain maupun milik publik akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat. Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan ditandai dengan semakin menurunnya jumlah pengaduan masyarakat, namun di sisi lain pengaduan masyarakat menunjukkan kepedulian dan kontribusi masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Beberapa hal yang akan dilakukan BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain adalah dengan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM melalui kegiatan KIE kepada masyarakat tentang berbagai layanan yang disediakan BPOM seperti Halo BPOM, *website,* dan media sosial BPOM. Pesan atau tema utama yang disampaikan adalah Sumber Layanan Informasi tentang keamanan Obat dan Makanan di BPOM. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Langkah Langkah pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh BPOM. Informasi tentang media layanan yang dapat diakses oleh masyarakat perlu disampaikan seluas luasnya kepada masyarakat. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses langsung kepada petugas pelayanan publik harus tetap diakomodir di masa pandemi covid 19 ini karena diberikan layanan langsung merupakan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Kehilangan hak istimewa untuk dilayani secara langsung akan menurunkan kepuasan atas kinerja pengawasan obat dan makanan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	91,72	101,91	Baik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Pada triwulan III tahun 2021 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP dan hasil pengukururan indeks kepuasan masyarakat BBPOM Surabaya adalah 91,72 dari target yang ditetapkan 90

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM Surabaya tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,91% dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 BBPOM di Surabaya dilakukan terhadap 3 (tiga) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb :

- Pengujian : 10 orang
- SKI/SKE : 78 orang
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 250 orang

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BBPIM Surabaya terhadap penyelenggaraan layanan publik adalah sebesar 91,72 terhadap target yang ditetapkan yaitu 90,00. Berdasarkan hasil survey tersebut layanan publik di BBPOM Surabaya mendapat katagori A (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2020 yaitu 91,50 maka terjadi kanaikan indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,22. Rincian unsur hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Unsur Pelayanan		Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
U1	Persyaratan	89,55	90,90	+1,35
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,78	91,41	+0,63

Unsur Pelayanan		Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun
U3	Waktu Penyelesaian	90,63	91,16	+0,53
U4	Biaya/Tarif	91,72	92,71	+0,99
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91,32	91,92	+0,60
U6	Kompetensi Pelaksana	92,75	92,34	-0,41
U7	Perilaku Pelaksana	94,53	92,53	-2,00
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	92,46	91,55	-0,91
U9	Sarana dan Prasarana	89,74	90,95	+1,21
	Total	91,50	91,72	

Dari hasil survey tersebut nampak bahwa 6 unsur pelayanan mengalami kenaikan dan 3 unsur mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan selama setahun terakhir telah menunjukkan hasil namun ternyata masih ada yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana layanan dan memperbaiki penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama masa pandemi covid 19 layanan dialihkan hampir semuanya melalui media sosial dan tidak ada interaksi langsung (nir kontak) dengan konsumen. Dibutuhkan kompetensi khusus bagi pemberi layanan untuk memberikan layanan secara daring (online) sehingga semua informasi yang diberikan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen. Belum lagi kemampuan konsumen yang berbeda beda dalam menggunakan peralatan/gadget komunikasi membuat mekanisme pemberian informasi tidak sepenuhnya dapat sampai kepada sebagian konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih konsultasi tatap muka langsung, dimana mereka mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta dapat melakukan klarifikasi langsung kepada pemberi layanan. Selain itu, para konsumen bahkan bisa minta didampingi mengisi aplikasi e sertifikasi, e registrasi, e bpom, e notifikasi atau Asrot jika menemui kesulitan saat mengisi di tempat kerja atau di rumah. Kehilangan hak istimewa inilah yang menyebabkan hasil survey Kepuasan Masyarakat menurun terutama di unsur kompetensi dan perilaku pelaksana layanan.

Demikian juga halnya dengan penanganan pengaduan masyarakat. Jika dibandingkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2020 terjadi penurunan 0,91 poin. Hal ini disebabkan selama masa pandemi Covid-19 tidak dapat dilaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memerlukan pemeriksaan ke sarana sehingga tindak lanjut yang dilakukan dianggap belum tuntas. Selain itu masyarakat tidak dapat melakukan pengaduan dengan datang langsung ke kantor BBPOM Surabaya karena pembatasan jumlah pengunjung ke BBPOM Surabaya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2021, BBPOM Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survey juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Pelatihan memberikan layanan secara daring/nir kontak harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi dan perilaku pemberi layanan. Memang dibutuhkan skil khusus untuk melayani konsumen yang tidak dapat dilihat dan dihadapi secara langsung. Pemberi layanan harus mampu membaca *undesired needs* konsumen hanya dengan membaca chat melalui WhatsApp atau email. Hal ini memang bukan hal yang mudah, dan pemberi layanan publik harus segera melakukan adjustment/penyesuaian. Beberapa layanan diberikan secara virtual menggunakan media daring namun tetap dapat memberikan layanan face to face kepada konsumen. Inovasi Cangkrukan Anda Menanyakan Kami Menjawab merupakan layanan private dari 1 pemberi layanan kepada 1 orang konsumen melalui media zoom meeting. Diharapkan layanan inovasi ini dapat mengobati kekecewaan masyarakat yang tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan petugas layanan BBPOM Surabaya.

Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Kotak saran di kantor jelas tidak dapat diandalkan sebagai satu satunya sarana pengaduan selama pandemi. Karena itu BBPOM Surabaya menambahkan fitur pengaduan melalui website BBPOM Surabaya di www.bbpomsurabaya.pom.go.id. Sementara media pengaduan melalui WhatsApp, email, IG, Twitter, dll tetap dijalankan seperti sebelum masa pandemi. Sejak bulan September 2021 BBPOM Surabaya telah memberikan layanan pengaduan dan layanan informasi secara langsung dengan penerapan protocol Kesehatan yang sangat ketat.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 14. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89 %	98,91 %	111,14 %	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel,

hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan IV tahun 2021, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 958 keputusan/rekomendasi dari 972 keputusan/ rekomendasi yang diterima yaitu 98,91%.

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 **telah mencapai target** yaitu 111,14 % dengan kriteria **sangat baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan IV, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,51%. Terjadi peningkatan dibanding pada triwulan III (94,28 %) disebabkan secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tersebut. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 97,14%.

Rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT disebabkan datangnya surat dari Pusat diakhir bulan Desember sehingga tindak lanjutnya akan dilakukan di bulan Januari.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 100,0%, karena BBPOM di Surabaya selalu berkoordinasi dengan Pusat terkait pelaporan hasil pemeriksaan BBPOM di Surabaya yang perlu tindak lanjut dari Pusat dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100,0%.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan IV tahun 2021, untuk mempertahankan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya tetap akan melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
- Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan konsisten terhadap masing-masing persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi tersebut.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 15. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan IV

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	62 %	65,04 %	104,90 %	Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi

profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada triwulan IV tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 797 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 486 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 104,90% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan IV tahun 2021, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 60,84%. Terjadi penurunan dibanding triwulan III (61,79%), disebabkan belum dilakukan monitoring terhadap pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA (tindakan perbaikan) dari hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor diperoleh hasil sebesar 69,23 %, yang sebelumnya di triwulan III masih 0 % disebabkan karena pada triwulan IV Dinas Kesehatan sudah mulai memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan sarana IRTP yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya. Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor melebihi target yang ditetapkan.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan, disebabkan karena mulainya kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, untuk mencapai indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector sesuai target yang ditetapkan, maka Balai Besar POM di Surabaya :

- Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Melakukan monitoring terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dan terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha / lintas sector atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sector dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Merapikan penataan database surat rekomendasi hasil inspeksi.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98%	99,20	101,23%	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak

ketiga. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kediri dan Loka POM di Jember.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan IV diperoleh dari 18516 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan 18665 sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 99,20%. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 101,23% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kondisi pandemi yang masih terjadi hingga triwulan IV tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara *on site* menjadi berkurang. Pada TW IV, seluruh pelaksanaan audit dalam rangka sertifikasi dilakukan secara *on site* dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa sarana yang meminta hasil swab test PCR atau Antigen petugas yang akan melakukan audit ke perusahaan tersebut. Jika demikian, petugas yang akan melaksanakan audit juga akan meminta hasil tes Covid-19 terbaru untuk pegawai dari perusahaan tersebut yang akan mendampingi dan menjelaskan selama proses audit berlangsung.

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Badan POM menerapkan Izin Penerapan CPPOB yang dapat diakses melalui aplikasi e-sertifikasi CPPOB sejak November 2021. Hal ini menyebabkan jumlah permohonan audit sarana produksi pangan Usaha Mikro Kecil pada TW IV tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan TW IV di tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan proses bisnis yakni Usaha Mikro Kecil pangan yang memiliki produk dengan kategori rendah dan sedang pada tahapan awal proses pendaftaran produk tidak perlu dilakukan audit sarana. Pelaku Usaha Mkro Kecil harus mengurus IP CPPOB sebagai langkah awal sebelum mendaftarkan produk pangan ke sistem *e-registration*. Proses yang dilakukan saat penerbitan IP CPPOB adalah evaluasi dokumen terkait kondisi sarana dan panduan mutu. Setelah IP CPPOB diterbitkan maka pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak IP CPPOB terbit dan pelaku usaha mikro kecil dapat secara paralel mendaftarkan produk melalui sistem *e-registration*. Dengan diberlakukannya IP CPPOB terdapat beberapa kendala pemenuhan dokumen oleh pelaku UMK pangan sehingga penerbitan IP CPPOB memerlukan waktu cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil yang rendah untuk dapat memahami proses pada sistem e-sertifikasi

terutama dalam hal pemenuhan dokumen panduan mutu meskipun template/ contoh dokumen yang diperlukan dalam pengurusan IP CPPOB telah disediakan oleh petugas. IP CPPOB yang diterbitkan hingga akhir Desember 2021 sebanyak 1 IP CPPOB.

Berbanding terbalik dengan pemeriksaan sarana produksi pangan, terdapat peningkatan pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dalam rangka SKPA CPOTB Bertahap. Hal ini disebabkan oleh proses perpanjangan SKPA CPOTB Bertahap pada beberapa UKOT/ UMOT yang akan berakhir di tahun 2021.

Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemi berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi.

Untuk pengajuan sertifikasi CDOB sampai dengan TW IV, terdapat 94,55% pengajuan memenuhi *timeline*. Terjadi penurunan capaian dibandingkan TW III disebabkan adanya pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga tidak dapat segera dilakukan inspeksi sesuai *timeline*. Untuk pemenuhan CAPA dari pelaku usaha masih memenuhi *timeline.* Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan timeline SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan waktu penerbitan (timeline) SKI / SKE
- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini

penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.

- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat hal tertentu yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas SKI / SKE Kedeputian I, II, atau III terkait perbedaan pemahaman peraturan, adanya kebijakan pusat terkait SKI/SKE seiring dengan kondisi pandemi. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi lama waktunya sehingga berpengaruh terhadap keputusan petugas balai untuk menerima pengajuan SKI / SKE atau meminta tambahan data kepada pelaku usaha sehingga waktu evaluasi menjadi lebih lama.

Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara melakukan evaluasi terlebih dahulu bagi SKI yang memberikan tambahan data (SKI yang sebelumnya ditolak), SKI komoditi obat, kosmetik, dan pangan. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor oleh BBPOM di Surabaya tetap dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja sesuai dengan inovasi SKETSA (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu hari Aja).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan-triwulan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Terdapat penurunan persentase capaian dibandingkan di TW III disebabkan oleh meningkatnya target pada TW IV sebagai hasil dari Reviu Renstra 2020-2024 yang disahkan pada bulan Desember 2021, yaitu menjadi 98,00%. Capaian yang baik tentunya didukung oleh komitmen petugas dan peningkatan pemahaman dari pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan. Kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi oleh para petugas. Sekalipun sudah mencapai target, hal-hal sebagai berikut akan tetap dilaksanakan, di antaranya:

- Melakukan optimalisasi pengaturan jadwal petugas subkelompok substansi sertifikasi untuk dapat melaksanakan evaluasi dokumen SKI/SKE
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Badan POM dan tim IT BBPOM di Surabaya terkait kendala yang terjadi pada sistem e-bpom dan jaringan internet yang seringkali terjadi sehingga petugas dapat memberikan informasi kepada pengguna e-bpom bila terjadi gangguan pada sistem.

- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir.
- Melaksanakan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.
- Melaksanakan *desk CAPA* secara berkala agar penyelesaian CAPA dari UKOT atau UMOT dalam rangka CPOTB Bertahap dapat segera terpenuhi sehingga SKPA CPOTB Bertahap dapat segera diterbitkan.
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Badan POM dalam penerapan e-sertifikasi CPPOB.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 17. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	57,47%	104,49%	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Sampai triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 348 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil sebanyak 200 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 148 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga

diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2021 adalah sebesar 57,47 %.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,49 % dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri Farmasi) sebanyak 19 sarana dengan hasil 14 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 35 sarana dengan hasil 22 sarana memenuhi ketentuan dan 13 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi IOT sebanyak 3 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UKOT sebanyak 28 sarana dengan hasil 20 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 4 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi suplemen Kesehatan sebanyak 1 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 214 sarana dengan hasil 126 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 88 sarana tidak memenuhi ketentuan; dan pemeriksaan sarana produksi pangan PIRT sebanyak 44 sarana dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 32 sarana tidak memenuhi ketentuan, sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2021 adalah sebesar 57,47 %.

Dari hasil pemeriksaan sarana produksi pangan PIRT, diperoleh hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan sebesar 32 sarana dari total 44 sarana yang diperiksa. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya pemenuhan cara pembuatan pangan IRTP yang baik pada produk pangan industri rumah tangga.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, telah dilakukan reviu target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Reviu Renstra 2020-2024 di Bulan Desember 2021, dari 51% menjadi 55%. Untuk mempertahankan capaian persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dan menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Jawa Timur, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait terkait sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik.

Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60 %	70,36 %	117,26 %	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, dilakukan pemeriksaan terhadap 641 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 451 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 190 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh

perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 adalah sebesar 70.36%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 **telah berhasil mencapai target** yaitu 117,26 % dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I terdapat perubahan focus pemeriksaan sarana distribusi sesuai surat edaran nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Pada surat edaran tersebut dijelaskan perubahan focus pengawasan sarana distribusi yaitu pada sarana distribusi dan pelayanan pengawasan kefarmasian yang terlibat pada program nasional vaksinasi covid-19. Sesuai surat edaran B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penyesuaian target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2021 (re-focusing), disampaikan perubahan target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian puskesmas menjadi 371 sarana, dengan cakupan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 82% dari cakupan pemeriksaan sarana distribusi total, sehingga target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sejumlah 638 dari target total pemeriksaan sarana distribusi 774.

Pada Triwulan III terdapat Surat Edaran No. B-PR.03.01.2.21.07.21.355 tanggal 25 Juli 2021 tentang Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021 (Refocusing dan Realokasi Belanja Kementrian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV). Adanya penghematan anggaran berdampak pada adanya penurunan target pemeriksaan sarana distribusi sebanyak 20% tetapi dengan tetap mempertahankan target pemeriksaan Puskesmas sebagai prioritas nasional untuk menjadi focus pemeriksaan sarana distribusi pada Triwulan III.

Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian sejumlah 479 sarana dengan hasil 348 sarana memenuhi ketentuan dan 131 sarana tidak memenuhi ketentuan; dan dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika dan pangan sebanyak 162 sarana dengan hasil 103 sarana memenuhi ketentuan dan 59 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Capaian indikator pada tahun 2021 mencapai 117,26%. (sangat baik). Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Pada bulan Januari – September 2021, terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di focuskan pada sarana-sarana intensifikasi tersebut.
- Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
- Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik2 kritis yang harus ada pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu vaksin Covid-19; SOP Pengiriman Vaksin Covid-19; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar dalam kondisi darurat Pandemi Covid-19; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi covid-19 yang telah dimasukkan dalam kantong; form Berita acara pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; dan form rekap vial bekas vaksinasi Covid 19 yang telah dimusnahkan.
- Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk CCP di sarana pelayanan kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.
- BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan CCP. Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, dimana capaian pada triwulan III tidak dapat disimpulkan, maka telah dilakukan reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 di Bulan Desember 2021 sehingga target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berubah dari 57%

menjadi 60%. Untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 19. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,52	103,91	Baik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sejak triwulan II tahun 2021 telah diperoleh Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan BBPOM Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,52 atau termasuk pada Katagori Pelayanan Prima.

Ccapaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 **telah berhasil mencapai target** yaitu 103,91 % dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit layanan Publik tahun 2021 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,52 bagi BBPOM di Surabaya menunjukkan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar 4,11. Belajar dari rendahnya nilai IPP tahun 2020 bahkan turun dari nilai IPP tahun 2019, BBPOM Surabaya melakukan berbagai upaya, antara lain sbb :

- Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, Perkosmi, GAPMMI, akademisi diwakili oleh Universitas Airlangga dan Universitas Surabaya, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, Muslimat, Fatayat, dll, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dll
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayanan publik.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan.
- Meningkatkan responsive waktu pelayanan lebih cepat.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.

- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi, dll. Prinsip dalam pelayanan publik adalah *no one left behind,* semua harus mendapat layanan yang sama.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan *tracking system* untuk layanan pengujian pihak ketiga yaitu SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu) sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Surabaya. Selain itu BBPOM di Surabaya juga telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik misalnya : **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawaal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional)**,** dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Setelah dilakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik, BBPOM di Surabaya akan senantiasa melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan publik antara lain sbb :

- Melakukan survey pelayanan publik secara mandiri secara terus menerus sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan metode *reward* untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan publik.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain SURAMADU (Telusur Sampel Pihak Ketiga Terpadu), **Laskar** (Sistem Informasi Layanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi), **Cangkrukan** (Bincang dengan Kru Layanan), **Pinarak Rek, Serasi** (Sistem Informasi Registrasi dan Sertifikasi), dan **Gempur Jatim** (Gerakan Mengawaal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), **SiPPOTra** (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional)**,** dan **Sketsa** (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja)**.** Semua aplikasi pendukung tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam arti lebih cepat, transparan, adil, fair dan professional.
- Melengkapi layanan informasi FAQ secara up to date dengan kemudahan akses bagi konsumen.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

7. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Triwulan IV Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	55	57,73	104,97	Baik

Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100%

Jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB yang dihitung termasuk UMKM yang sudah dilakukan pembinaan pada tahun lalu dan dapat memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun ini.

Hingga Triwulan IV, pembinaan UMKM pangan dilaksanakan terhadap 388 sarana UMKM pangan, terdiri dari sarana Gempur Jatim proses seleksi dan sarana Gempur Jatim proses mandiri. Sarana Gempur Jatim proses mandiri juga meliputi sarana UMKM pangan yang diusulkan oleh lintas sektor, yaitu Dinas Perdangan Kota Surabaya, Universitas Ma Chung, dan Politeknik Universitas Negeri Malang, Kementerian Koperasi dan UKM. Dari 388 sarana yang telah dilakukan pendampingan, sebanyak 224 sarana telah memenuhi ketentuan CPPOB.

Capaian Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun 2021 telah **berhasil mencapai target** yaitu 104,97 % dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan IV, diperoleh capaian lebih dari 100% target disebabkan oleh bimbingan dari petugas sebelum dilakukan pemeriksaan sarana, di antaranya dengan adanya pendampingan terkait persiapan sarana dan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan CPPOB. Pemeriksaan sarana produksi usaha mikro dan kecil diutamakan pada aspek higiene dan sanitasi yang dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen yang tinggi.

Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat sarana usaha mikro kecil yang belum memenuhi aspek CPPOB dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha. Bahkan ada beberapa sarana yang tidak dapat melanjutkan perbaikan sarana dan memutuskan untuk menghentikan proses pendaftaran produk.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan-triwulan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang tetap harus menjadi perhatian petugas:

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi terkait persyaratan pemenuhan CPPOB, di antaranya *lay out* ruang produksi, definisi proses produksi, dan dokumen terkait yang diperlukan.
2. Mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan CPPOB dengan memberikan bimbingan dan arahan terkait sarana produksi dan dokumentasi terutama untuk

sarana yang telah diperiksa, baik melalui jalur mandiri maupun jalur seleksi pada kegiatan Gempur Jatim.

3. Mengadakan *desk* pemenuhan CPPOB terhadap pelaku usaha yang sarana produksinya belum memenuhi ketentuan CPPOB.
4. Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
5. Memberikan pemahaman kepada lintas sektor terkait tahapan dan kriteria pendampingan agar dapat meningkatkan capaian keberhasilan pendampingan dalam memenuhi ketentuan CPPOB.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TW IV	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10	91,51	100,45	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

BBPOM Surabaya melaksanakan Survey Efektifitas KIE Triwulan IV tahun 2021 dengan jumlah responden hingga sejumlah 383 orang (responden minimal 30 orang tiap triwulan). Survey

dilaksanakan terhadap responden yang telah menerima kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya, KIE melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll.

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada triwulan IV **telah berhasil mencapai target** yaitu 100.45% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah melaksanakan sebanyak 46 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Malang, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Bojonegoro, Surabaya, Sidoarjo dengan peserta kurang lebih sebanyak 500 orang di tiap titik lokasi. Selain itu BBPOM Surabaya juga melaksanakan berbagai kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkru'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali masing masing diikuti oleh 25 sampai 40 peserta. Kegiatan Cangkru'an ini dilaksanakan berdasarkan jadwal rutin yang telah ditetapkan maupun dalam rangka memenuhi permintaan komunitas tertentu misalnya komunitas Insipirator Lebah Madu Indonesia dan Zam Zam Group atau lintas sektor tertentu misalnya Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur. BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan penyebaran informasi/penyuluhan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh lintas sektor di kabupaten/kota se Jawa Timur. Media sosial dan media cetak juga menjadi sarana bagi BBPOM Surabaya untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makan terutama yang sesuai dengan isu yang sedang banyak terjadi di masyarakat. BBPOM Surabaya harus peka akan kebutuhan informasi masyarakat. Media yang dipilihpun menjadi penentu apakah pesan yang ingin disampaikan sampai secara efektif atau tidak kepada masyarakat.

Bergerak dari hasil survey pada triwulan IV tahun 2021 ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 yang belum mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus bekerja

lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih *friendly* dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang telah mencapai target tetap harus menjadi perhatian bagi Tim BBPOM Surabaya agar bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Berbagai bentuk dan metode KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan medote daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Surabaya tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu BBPOM Surabaya sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh BBPOM Surabaya akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjaring minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan Pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor, Pemerintah Daerah, swasta dan perguruan tinggi harus menjadi langkah strategis wajib bagi BBPOM Surabaya di masa depan untuk memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Kerjasama dengan Dinas Kominfo harus terus diperkuat untuk memanfaatkan berbagai media informasi yang dimiliki. Demikian juga Kerjasama dengan Radio dan Televisi lokal harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemberian informasi kepada masyarakat.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 22. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TW IV	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42	42	100%	Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Bojonegoro. Target tahun 2021 adalah 26 sekolah baru dan 16 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020.

Tahapan intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan kepada kader keamanan pangan sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Pengelola Kantin dan siswa. Bimbingan teknis dilaksanakan secara daring maupun luring tergantung kondisi penyebaran covid 19 di masing masing kabupaten/kota. Pada saat bimbingan teknis diberikan materi tentang keamanan pangan dan juknis kegiatan PJAS. Menyertai bimbingan teknis dilakukan pre dan post test untuk mengetahui pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu juga dilakukan survey untuk mengetahui Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Kader Keamanan Pangan sebelum intervensi.

Kepada sekolah yang diintervensi juga diberikan paket edukasi berupa permainan ular tangga Keamanan Pangan, Banner, Komik, Leaflet, Buku, dan Poster yang dikirim ke sekolah untuk dipasang di lingkungan sekolah dan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang Keamanan Pangan kepada seluruh komunitas sekolah. Setelah itu dilakukan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah untuk memastikan: intervensi keamanan pangan oleh kader keamanan pangan kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri, sekolah telah memiliki SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Sekolah memiliki Rencana Aksi Keamanan Pangan, intervensi keamanan pangan telah didokumentasikan dengan baik, dan dilakukan survey pengetahuan, sikap dan perilaku pasca intervensi keamanan pangan kepada siswa dan kader.

Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Hingga triwulan IV tahun 2021, realisasi sekolah yang terintervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah 42 sekolah. Capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Triwulan IV tahun 2021 yang merupakan tahapan akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 42 sekolah yang terdiri dari 16 sekolah target intervensi tahun 2020 dan 26 sekolah target intervensi tahun 2021. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Dalam rangkaian sertifikasi sekolah dengan PJAS aman dilakukan sampling dan pengujian pangan jajanan anak sekolah yang disediakan di kantin maupun penjaja PJAS di sekitar sekolah. Sampling dilakukan terhadap pangan jajanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya formalin, boraks, rodhamin B dan Methanil yellow. Pengujian dilakukan menggunakan Test Kit Bahan Berbahaya. Secara umum terjadi penurunan persentasi pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya sebelum dan sesudah intervensi.

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi pandemi Covid 19 merupakan kendala terbesar pelaksanaan program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah karena kegiatan pembelajaran terpaksa dialihkan secara daring sehingga seluruh kantin sekolah tidak beroperasi bahkan pada saat pembelajaran telah dilakukan secara tatap muka sebagian besar kantin sekolah juga tetap tutup. Berbagai penyesuaian telah dilakukan antara lain melakukan Sosialisasi Keamanan Pangan ke 483 Sekolah yang bukan merupakan target intervensi tahun 2021 dari 441 target sekolah. Pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah juga akan dilakukan melalui media yang ada dan memungkinkan untuk melakukan penyebaran informasi kepada komunitas sekolah.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Dari hasil sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, seluruh sekolah yang menjadi target intervensi tahun 2020 dan 2021 memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman. Seluruh sekolah telah memiliki Rencana Aksi Keamanan Pangan dan diharapkan akan dilaksanakan

sesuai dengan perencanaan. Kepada seluruh sekolah telah disampaikan bahwa rencana aksi keamanan pangan tidak harus dilaksanakan dengan anggaran yang besar dan waktu khusus. Kegiatan keamanan pangan dapat diintegrasikan dengan kegiatan sekolah sehari hari dan tidak perlu waktu khusus. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dan kontinuitas kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan sekolah dan menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar. Para kader keamanan pangan sekolah juga disarankan untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah.

Semua sekolah juga berkomitmen untuk memperluas program keamanan pangan ke sekolah sekolah di sekitar (sekolah imbas) sehingga program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan. Pengawasan kepada penjaja pangan di sekitar sekolah harus dilakukan dengan pendekatan secara persuasive dan humanis sehingga para penjaja pangan tersebut sadar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara sukarela. Beberapa jenis pangan yang menjadi kegemaran anak anak harus dipastikan aman dari bahan berbahaya dan memenuhi syarat hygiene-sanitasi terutama penggunaan air sebagai bahan baku pangan jajanan yang umumnya belum memenuhi syarat air minum sehingga mengakibatkan cemaran mikroba pada pangan. Target akhir dari Program Pengawasan Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah ini adalah jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi program ini dan memasukkannya dalam program prioritas pemerintah daerah.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 23. Jumlah desa pangan aman triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TW IV	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	19	19	100	Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan

≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Hingga triwulan IV tahun 2021, seluruh desa yang menjadi target intervensi tahun 2021 yaitu 13 desa telah tercapai, demikian pula dengan target pengawalan desa tahun 2020 yaitu 6 desa sehingga progress intervensi jumlah desa pangan aman adalah 19 desa. Capaian jumlah desa pangan aman **sudah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada akhir triwulan IV tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman telah melalui beberapa tahap yaitu advokasi, pengadaan paket informasi dan Rapid Test Kit, dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa Pangan Aman. Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember dan Kabupaten Madiun. Pelatihan Kader dan Bimtek Komunitas telah dilaksanakan di 13 desa yang menjadi target intervensi tahun 2021.

Program Keamanan Pangan Desa merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang diintervensi adalah IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Pada saat bimtek kader telah diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan

menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini telah melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes.

Jika dilihat dari hasil capaian Program Keamanan Pangan Desa tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang cukup berarti. Kondisi pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 telah membuat BBPOM Surabaya menyesuaikan metode pelaksanaan tahapan Program Keamanan Pangan Desa sesuai kondisi di masing masing Desa. Penerapan protocol Kesehatan secara ketat selalu diupayakan sehingga tidak terjadi kluster baru penularan covid 19.

Pada akhir triwulan IV tahun 2021 telah terbentuk kader keamanan pangan desa (KKPD) di 13 desa sehingga total KKPD sebanyak 155 orang dan telah terbentuk 650 orang komunitas yang terdiri dari komunitas ibu rumah tangga, komunitas remaja, komunitas sekolah, komunitas ritel, komunitas pelaku usaha pangan siap saji dan komunitas pelaku usaha pangan olahan.

Salah satu tahapan program desa pangan aman adalah intensifikasi keamanan pangan dimana dilakukan pengambilan sampel dan pengujian pangan mengandung bahan berbahaya. Para kader diberikan pengetahuan bagaimana melakukan pengujian pangan menggunakan Rapid Test Kit Bahan Berbahaya yang telah diberikan oleh BBPOM Surabaya. Para kader diharapkan memanfaatkan dengan baik Rapid Test Kit yang diberikan untuk melakukan pengujian secara mandiri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi intensifikasi pengawasan keamanan pangan masih ditemukan pangan mengandung bahan berbahaya yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat desa. Meskipun terjadi penurunan peresentasi pangan mengandung bahan berbahaya sebelum dan sesudah intervensi program desa pangan aman namun masyarakat harus tetap waspada dan terus mengkampanyekan prinsip prinsip keamanan pangan kepada seluruh komunitas masyarakat desa termasuk kepada pelaku usaha produsen pangan olahan yang ada di desa. Pada saat monitoring dan evaluasi program

desa pangan aman, para kader dan apparat desa dianjurkan untuk menyusun Rencana Program Keamanan Pangan Desa yang akan dilaksanakan secara mandiri, termasuk memanfaatkan secara maksimal Rapid Test Kita Bahan Berbahaya yang telah diberikan oleh BBPOM Surabaya. Desa yang telah diintervensi juga disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwuan IV tahun 2021

Tabel 24. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN TW IV	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	12	100	Baik

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Hingga triwulan IV tahun 2021, jumlah pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi adalah 8 pasar yang merupakan target tahun 2021 dan 4 pasar yang merupakan pengawalan pasar tahun 2020. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **sudah berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Sampai pada akhir triwulan IV tahun 2021 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 8 Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan survey pasar, bimtek petugas pasar, monev tahap I, penyuluhan, kampanye dan monev tahap II.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah direncanakan dan relative tidak menemui kendala yang berarti. Saat ini telah dilaksanakan bimtek kepada 125 orang petugas pasar, penyuluhan kepada 400 orang pedagang pasar dan kampanye kepada 160 orang pengunjung pasar tentang prinsip prinsip keamanan pangan yang dapat diterapkan di pasar. Pada monev I telah dilakukan pengambilan 800 sampel dan dilakukan pengujian terhadap bahan berbahaya. Demikian juga pada monev tahap II telah dilakukan pengambilan 800 sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan dilakukan pengujian bahan berbahaya menggunakan Rapid Test Kit.

Secara umum terjadi penurunan persentase pangan mengandung bahan berbahaya namun demikian perlu diperhatikan parameter mikrobiologi yang masih cukup tinggi ditemukan pada pangan siap saji yang dijual di pasar. Kemungkinan kontaminasi berasal dari air yang digunakan sebagai bahan baku pangan tersebut. Kampanye keamanan pangan harus terus dilakukan kepada para pedagang dan pengunjung pasar sehingga dapat diciptakan Pasar Pangan Aman yang bebas dari Bahan

Berbahaya. Pengaruh konsumen sangat besar untuk mendesak para pedagang agar tidak lagi menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2021 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan Rapid Test Kit dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan Rapid Test Kit secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survey pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama hygiene dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektlitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	96,3%	96,3%	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan IV tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya, dan sampel Obat yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 2384 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 2367 sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember telah diuji seluruhnya dengan 2192 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 96,30% namun sudah memperoleh kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian pada TW IV dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Adanya penurunan target sampel total BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember terkait pandemi Covid-19 yang semula 2738 menjadi 2384
- Keadaan Pandemi Covid yang meningkat mengharuskan pengaturan sistem WFH – WFO yang akan mengurangi kinerja pengujian sampel, mengingat pengujian hanya dapat dilakukan WFO. Untuk mengatasi kendala ini, sejak pertengahan bulan Agustus 2021 diberlakukan sistem piket bagi penguji, dimana selama WFH penguji ditugaskan menguji di laboratorium dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan segera kembali ke rumah untuk meneruskan pekerjaan dari rumah setelah pekerjaan laboratorium selesai dilakukan. Pengaturan piket semacam ini dapat meningkatkan penyelesaian sampel di laboratorium.
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia alat/instrument, reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia. Hal ini meningkatkan persentase pemenuhan timeline dan pemenuhan parameter sesuai pedoman sampling.

- Sampai dengan triwulan IV seluruh sampel dapat memenuhi parameter sesuai dengan pedoman sampling 2021.
- Adanya review terhadap target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021, dari 85% menjadi 100% sehingga mempengaruhi capaian.

Namun demikian masih terdapat sampel yang melebihi timeline, sejak TW I – IV sebanyak 175 sampel Obat melebihi timeline. Banyaknya sampel yang melebihi timeline disebabkan beberapa hal antara lain

1. Penguji di laboratorium mengutamakan tindak lanjut temuan reassesmen ISO 17025:2017 oleh KAN, berupa verifikasi metode Analisa.
2. Situasi pandemi yang menyebabkan lebih dari 10 orang penguji terpapar Covid-19 sehingga laboratorium menerapkan sistem WFH 100% pada bulan Juli, dan piket bergantian pada bulan berikutnya berimbas pada pemenuhan timeline sampel.
3. Terdapat beberapa kendala pada instrumen uji diantaranya kerusakan UPS pada alat *microwave digestion* laboratorium kosmetik sehingga harus bergantian menggunakan *microwave digestion* di laboratorium pangan
4. Sampel kasus komoditi obat tradisional yang cukup banyak dan hampir seluruhnya tidak memenuhi syarat membutuhkan perhatian khusus sehingga lebih diutamakan dibanding penyelesaian sampel rutin

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada TW sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%	99,34%	99,34%	Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan IV tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang disampling dan diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya, dan sampel Makanan yang disampling BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember dan telah diuji sesuai standar. Dari total 1126 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya, seluruhnya telah diperiksa sesuai standar, dan dari 1219 sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember telah diuji seluruhnya dengan 1203 sampel diuji sesuai standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,34 % namun sudah memperoleh kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk mengupayakan keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan**.**

Ketersediaan sarana prasarana seperti Instrumen, reagen, baku pembanding, suku cadang, metode Analisa maupun anggaran untuk perawatan instrumen merupakan hal yang mendukung tercapainya target. Adanya review terhadap target persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021, dari 85% menjadi 100% mempengaruhi capaian pada TW IV.

Sampai dengan triwulan IV seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan pedoman sampling namun terdapat 16 sampel yang diuji melewati timeline dikarenakan :

- Kondisi pandemi Covid-19 yang meningkat mengharuskan laboratorium menerapkan sistem WFO-WFH
- Permasalahan pada sensor alat *microwave digestion* sehingga menyebabkan beberapa sampel tertunda penyelesaiannya

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Perawatan instrumen secara berkala perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran pengujian. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2021, maka telah dilakukan review terhadap target indikator di tahun 2021.

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya efektlitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65%	68,73%	105,74%	Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :
a) SPDP sebesar 15% – nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% – nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c) P21 sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d) Tahap 2 sebesar 15% – nilai D (d / jumlah perkara)
Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)
Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.
Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Hingga TW 4, realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 68,73%.

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 105,74% dan mendapat kriteria "**baik**".

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan IV tahun 2021 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Target perkara pada awal tahun 2021 sebanyak 15 perkara, dengan adanya refocusing anggaran maka target perkara per Juli 2021 menjadi 6 perkara. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah tercapai 6 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 2 perkara dan sedang dalam proses pemberkasan (telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi dan tersangka), tahap I

sebanyak 2 perkara, P21 sebanyak 1 perkara dan tahap 2 sebanyak 1 perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap 1 sebanyak 3 perkara, P21 sebanyak 3 perkara termasuk 2 perkara yang telah diterbitkan SP3 (yaitu perkara tahun 2014 yang sudah kadalaluarsa) dan tahap 2 sebanyak 10 perkara.

- Penyelesaian 23 perkara carry over tahun 2014-2020 BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan IV sudah terealisasi sebanyak 12 perkara yaitu dengan penerbitan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) sebanyak 5 perkara, 2 bukan merupakan perkara karena belum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dan 5 perkara sudah dilakukan tahap 2, sedangkan dalam proses upaya tindak lanjut sebanyak 11 perkara.
- Terdapat 7 perkara carry over yang sudah P21 dengan rincian perkara tahun 2016 sebanyak 3 perkara, perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara (Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 1 perkara namun penyidik dari BBPOM di Surabaya dan 2 perkara BBPOM di Surabaya), sedangkan tahun 2020 sebanyak 1 perkara. Perkara carry over tersebut belum bisa dimajukan ke tahap 2 karena adanya kondisi tersangka yang sakit sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan tahap 2 serta karena tersangka melarikan diri.
- Rencana aksi yang telah dilakukan selama triwulan IV adalah :
  - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite.
  - Kegiatan penindakan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing, serta pemanggilan tersangka.
  - Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur.
  - Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
  - Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum.
  - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
  - Penyerahan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur.
  - Melakukan pembahasan penanganan perkara dengan Ahli Pidana/Akademisi.
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi, Operasi Penindakan, penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap I, P21 dan tahap 2 serta adanya persyaratan bebas Covid-19 bagi tersangka yang akan diserahkan (tahap 2),

selain itu adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses pemberkasan (pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak hadir) serta belum diperoleh bukti mengedarkan untuk kasus Obat-Obat Tertentu (OOT) yang ditemukan di ekspedisi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan IV telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria "baik", untuk mencapai target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite, peningkatan operasi penindakan, pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing di masa pandemi Covid-19.
- Penyelesaian perkara carry over yang masih memerlukan upaya tindak lanjut secara optimal.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
- Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 untuk uji bebas Covid-19.
- Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur/tahap 1.
- Melakukan pemanggilan ke-2 untuk tersangka yang tidak hadir untuk diperiksa.
- Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka memperoleh bukti mengedarkan untuk kasus Obat-Obat Tertentu (OOT) yang ditemukan di ekspedisi.

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	84,7	84,64	99,93%	Baik

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Berdasarkan penilaian indeks RB yang dilakukan oleh Inspektorat Utama diperoleh nilai 84,64. Capaian indeks RB tahun 2021 **belum sepenuhnya mencapai target** yaitu 99,93%, namun sudah memperoleh kriteria **Baik.**

Sedangkan berdasarkan penilaian Kementrian PAN dan RB, pada bulan Desember 2021 BBPOM di Surabaya telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) dengan nilai diatas 85.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Terdapat peningkatan nilai Indeks RB BBPOM di Surabaya pada tahun 2021 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama dibandingkan tahun 2020 (81,06). Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM telah

melakukan penilaian mandiri ZI dan telah dilaksanakan desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) sehingga mendapat nilai 92,81. Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : melakukan sosialisasi RB (Kultum RB) secara rutin setiap Apel online senin dan kamis mencakup semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi Gempur Jatim, benchmark dengan instansi yang sudah meraih WBBM yaitu Polres Tanjung Perak dan Baristand Surabaya, penyempurnaan aplikasi sikemah (absen pegawai online), penerapan aplikasi simpelsi (penilaian efektifitas pelatihan, monitoring mutasi/rotasi, form kepegawaian), pengembangan aplikasi siaset (monitoring pemeliharaan kendaraan dan pengaduan kerusakan), pengembangan aplikasi sirat (kelengkapan perjalanan dinas dari surat tugas hingga kuitansi), pelaksanaan Pinarak Rek, pembaruan website balai, penyempurnaan aplikasi serasi (registrasi dan sertifikasi produk), penyempurnaan aplikasi situpai (monitoring sampel pengujian PNBP), melaksanakan inovasi SIGAP (Survei Integirtas Petugas), replikasi Gempur Jatim oleh Dinas Perindustrian dan replikasi aplikasi sikemah dan TV lobby oleh BBPOM di Medan. Perbaikan pada triwulan II telah dilakukan sehingga nilai terakhir yang diperoleh meningkat menjadi 94,36. Perbaikan yang dilakukan antara lain dengan menambahkan sejumlah inovasi menjadi 29 inovasi beserta efektifitas/efeisiensi/dampak inovasi tersebut terhadap internal maupun terhadap masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembaruan data dukung hingga Juni 2021. Pada triwulan III telah dilaksanakan Pencanangan WBBM sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat dan stakeholder agar selalu dapat memberikan pelayanan yang prima. Pada triwulan IV, telah dilakukan penilaian oleh Kementrian PAN dan RB baik secara daring maupun kunjungan langsung ke kantor BBPOM di Surabaya. Hasilnya, pada Desember 2021, BBPOM Surabaya telah berhasil meraih predikat WBBM.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) telah ditindaklanjuti kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- Menetapkan target prioritas yang berkesinambungan dan evaluasinya
- Melakukan evaluasi rencana aksi AOC secara rutin dengan menginput data pada aplikasi e-monev RB
- Menambahkan yel-yel untuk menggambarkan keterlibatan seluruh anggota organisasi
- Menyiapkan alasan penurunan nilai indeks RB dan indeks PIKKIR pada survey Januari 2021 dibandingan hasil survey Juli 2020
- Menganalisa ada tidaknya perbaikan kinerja setelah dilaksanakan rekrutmen pegawai
- Menerapkan mekanisme reward punishment untuk kinerja tidak hanya disiplin saja
- Melakukan peningkatan kompetensi juga pada pegawai honorer
- Menambahkan data peningkatan indeks profesionalisme ASN

- Menonjolkan peningkatan inovasi dari WBK ke WBBM
- Membuat evaluasi WBS kenapa selalu nihil
- Menjelaskan semua pelaksanaan inovasi yang sudah ditetapkan
- Menambahkan testimoni untuk inovasi yang berdampak kepada masyarakat

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	82,6	82,79	100,23%	Baik

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Pada TW IV telah diperoleh nilai AKIP dari Inspektorat Utama yaitu 82,79 atau A. Capaian nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021 sudah **berhasil mencapai target** yaitu 100,23% dengan kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada tahun 2020, BBPOM di Surabaya telah berhasil meraih nilai AKIP A, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan maningkatkan nilai tersebut di tahun 2021. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Surabaya telah dilakukan pada bulan Maret 2021 pada aplikasi simolekdesi dengan hasil nilai 89,53. Upaya yang telah dilakukan sejak triwulan I

untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain : penyusunan realisasi PK individu tahun 2020, penyusunan PK individu tahun 2021, menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal, dan melengkapi cascading kinerja dari eselon 2 hingga individu dengan target dan realisasi. Desk SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021, dan pada bulan Desember 2021 diperoleh nilai 82,79 (A), meningkat 1,68 poin dibandingkan nilai AKIP tahun 2020.

Keberhasilan capaian nilai AKIP tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya reviu target yang terdapat pada Reviu Renstra 2020-2024 dari 85 diturunkan menjadi 82,6.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, telah dilakukan :

- pemetaan anggaran rencana aksi PK 2021
- melakukan rapat reviu renstra 2020-2024 dan membuat surat usulan penyesuaian target berdasarkan realisasi indicator tahun 2020 yang melebihi 120% ke Biro Perencanaan Badan POM.
- Melengkapi cascading kinerja seluruh pegawai BBPOM di Surabaya dengan target dan realisasi
- Melakukan pengisian realisasi PK individu secara online menggunakan form online (inovasi Janjiku) sehingga dapat dilakukan evaluasi data dan kinerja lebih cepat.
- Menyempurnakan mekanisme pemberian reward dan pusnishment

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85	83,11	97,78	Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pada triwulan IV telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya pada aplikasi SIASN sebesar 83,11.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahuun 2021 **belum mencapai target** yaitu 97,78% namun sudah mendapat kriteria **Baik.**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP triwulan IV. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan IV, semua pegawai telah memenuhi target 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom setiap senin dan kamis (inovasi apel manis) untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai. Untuk memacu kinerja pegawai, diterapkan juga mekanismen reward dan punishment pegawai, dimana pegawai yang mempunyai kinerja terbaik dan disiplin tinggi diberi penghargaan

pegawai teladan dengan diberi kompensasi peningkatan kompetensi sesuai pilihan pribadi dengan biaya dari kantor. Sedagkan untuk pegawai yang berkinerja terendah diberikan sertifikat pegawai berkinerja terendah untuk memacu pegawai tersebut meningkatkkan kinerjanya.

Pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan kriteria penilaian kompetensi, dimana semua pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi manajerial namun mendapat nilai kurang dari 78, maka tidak mendapat 15 poin untuk kompetensi. Terdapat 26 pegawai yang nilai komptensi manajerialnya kurang dari 78, sehingga tidak mendapat poin penuh untuk kompetensi. Hal ini berpengaruh pada rata-rata nilai IP ASN BBPOM di Surabaya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing. Dengan adanya 26 pegawai yang mempunyai nilai kompetensi kurang dari 78, maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan mendaftarkan kembali untuk mengikuti ujian kompetensi manajerial di pusat.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78	80,1	102,69	Baik

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Pada tiap triwulan dilakukan monev pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), pada Triwulan IV telah dilakukan penilaian secara kumulatif terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium dan BBPOM di Surabaya mendapat nilai Presentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 80,80%, pemenuhan Standar Kompetensi personel laboratorium sebesar 81,22% dan Standar Alat Laboratorium sebesar 78,15%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan IV sebesar 80,1%.

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 **sudah berhasil mencapai target** yaitu 102,69% dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Laboratorium BBPOM di Surabaya berusaha untuk mengejar target yang telah ditetapkan untuk tahun 2021. Adanya reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021 dari 80,5 menjadi 78 mempengaruhi keberhasilan pencapaian target. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan verifikasi metode, Sampai dengan triwulan IV verifikasi metode analisis yang telah terlaksana adalah sebanyak 199 metode analisis
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari

P3OMN terutama untuk penguji yang belum memiliki sertifikat untuk kompetensi - kompetensi yang dipersyaratkan.

- Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Telah diupayakan melakukan pemetaan roadmap target pemenuhan GLP baik dari sisi pemenuhan SRL, pemenuhan kompetensi maupun pemenuhan instrumen.

Upaya peningkatan SRL dilakukan dengan membuat list parameter uji yang belum dapat dilakukan maupun yang belum diuji dan berkoordinasi dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan agar sampel dengan parameter uji tersebut dapat disampling.

Peningkatan persentase pemenuhan alat dilakukan dengan pengadaan alat pada tahun 2021 dan mengirimkan usulan pengadaan alat tahun 2022 ke P3OMN dalam rangka pemenuhan GLP dan penyelesaian uji.

Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.

Pada triwulan IV Laboratorium pengujian telah mengoptimalkan kegiatan peningkatan kompetensi personel pengujian dengan pelaksanaan kegiatan bimtek internal khususnya pada laboratorium pengujian kimia. Pelaksanaan bimtek internal dilaksanakan pada triwulan IV karena materi yang menjadi tema bimtek merupakan materi yang kompleks sehingga harus dilaksanakan secara tatap muka (luring), pada triwulan IV ini kondisi pandemi dinilai mulai membaik sehingga memungkinkan dilaksanakan tatap muka dengan tetap penerapan protokol kesehatan.

Dengan adanya regionalisasi laboratorium yang akan dimulai pada tahun 2022 diharapkan Standar Kemampuan Laboratorium dapat diupdate sesuaik dengan kondisi tersebut, mengingat laboratorium tidak lagi menguji parameter yang sama, namun dibagi menjadi Balai Spesifik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat dicapai efisiensi pengujian baik dari segi waktu, reagen, baku pembanding maupun instrumen.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,26	2,48	109,73	Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracuanan.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun indlidu.

Pada triwulan IV tahun 2021 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 2,48 dengan capaian 109,73%, sudah **melebihi target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi indikator hingga triwulan IV dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut :

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
2	3	3	2	3	3	2,48

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi triwulan IV sudah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev input SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses email pegawai dengan mentautkan Absensi Online "SIKEMAH" dengan halaman login email pom.go.id, serta mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id dengan permintaan untuk reply.
- Tetap rutin melakukan upload berita actual dengan target 30 berita dalam 1 triwulan

Nilai indeks pemutakhiran SIPT pada Triwulan IV masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya :

- Pengisian aplikasi SIPT untuk sampel 2021 tidak dapat dilakukan pada awal tahun, karena menunggu *cut off* pengisian sampel tahun 2020
- Pengisian parameter uji, metode analisis dan syarat uji yang belum otomatis sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memproses satu sampel dari *role* sub koordinator pengujian ke penyelia menyebabkan beberapa sampel tidak dapat diinput
- Hasil pemeriksaan tidak lagi diisikan melalui aplikasi SIPT, hal ini menyebabkan sampel yang telah diverifikasi oleh Koordinator Pengujian tidak dapat diteruskan ke role Kepala Balai. Kendala ini pada akhir triwulan IV sudah mendapatkan solusi, namun dalam aplikasi SIPT masih terdapat penumpukan sampel yang perlu diverifikasi (*carry over)* sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk menyelesaikan laporan SIPT agar sejalan dengan jumlah sampel yang sedang dikerjakan saat ini.
- Hasil penandaan yang belum diinput oleh operator dari Balai lain (sampel rujukan) menjadikan hasil uji yang telah diverifikasi tidak dapat diteruskan ke role Kepala Balai

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian realisasi triwulan I hingga triwulan III yang sangat tinggi disebabkan oleh rendahnya baseline target yang ditetapkan, maka telah dilakukan reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 di bulan Desember 2021 dengan menaikkan target dari 2 menjadi 2,26.

Agar segera berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menyelesaikan kendala yang masih muncul dalam SIPT. Dan tetap melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan.

Sasaran Strategis 11
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	93,4	90,66	97,07%	Baik

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya pada triwulan IV tahun 2021 adalah 90,66, diperoleh dari nilai IKPA 96,95 dan nilai EKA 86,47. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 97,07% namun sudah mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian nilai kinerja anggaran hingga triwulan IV yang belum mencapai target, dipengaruhi oleh rendahnya nilai deviasi halaman 3 dipa pada komponen IKPA yang disebabkan oleh kesalahan memperkirakan pencairan gaji 13 dan 14. Selain itu masih ada keterlambatan pengajuan GUP nihil, 11 kesalahan SPM, 2 retur SP2D, dan penyerapan anggaran masih 95,68%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	135	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	68.19	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	95.68	100.00	100.00	99.87	0.00	95.00	92.11	95%	96.95	99.95	99.41	100.00	1.23	86.47
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.41	5.00	10.00	7.60	5.00	5.00	14.35	10.00	17.00	4.99	0.00	4.75								
				Nilai Aspek	89.40			98.75				98.89				95.00									

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai EKA hingga triwulan IV adalah 86,47 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi anggaran yaitu 99,95% sedangkan output tercapai 100%, sehingga efisiensi sangat rendah. Efisiensi akan tinggi jika output tercapai 100% dengan menggunakan anggaran sesedikit mungkin.

Adanya reviu target pada Reviu Renstra 2020-2024 pada Nilai Kinerja Anggaran yang menurun dari 94 menjadi 93,4 juga mempengaruhi capaian pada tahun 2021.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka perlu untuk memaksimalkan nilai IKPA dengan menyusun perencanaan penarikan halaman 3 DIPA seakurat mungkin, mengurangi kesalahan SPM dengan verifikasi berlapis, berusaha tepat waktu untuk pengelolaan UP/TUP.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan IV tahun 2021

Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan IV tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	92	100	108,70%	Baik

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

IE = (%capaian output) / (%capaian input)

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya hingga triwulan IV adalah 100%, diperoleh dari perhitungan realisasi 30 indikator kinerja dan realisasi anggaran 30 indikator kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 108,70% dengan kriteria "**baik**".

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya triwulan IV telah tercapai. Hal ini disebabkan karena hingga triwulan IV penyerapan anggaran cukup tinggi yaitu 99,95% dengan capaian indicator 102,64% sehingga menghasilkan Tingkat Efisiensi di atas 100 atau efisien sesuai Definisi Operasional indicator dari pusat. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 29 indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka telah dilakukan pemantauan setiap bulan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai di setiap triwulan. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp.50.526.716.000,-. Pada tanggal 3 Juni 2021 telah dilakukan revisi APBNP dalam rangka penghematan anggaran pada komponen tunjangan kinerja THR dan tunjngan kinerja gaji ke-13, sehingga pagu menjadi Rp.49.750.847.000,-. Pada tanggal 25 Juli 2021 dilakukan lagi revisi APBNP untuk penanganan pandemi covid, sehingga pagu menjadi Rp.48.356.819.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 2021 juga dilakukan revisi APBNP dalam rangka pemberian bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak pandemi covid 19, sehingga pagu menjadi Rp.45.791.819.000,-. Pada tanggal 4 November

2021 dilakukan revisi APBNP untuk menambah belanja pegawai menjadi Rp.45.856.819.000,-. Realisasi anggaran hingga triwulan IV tahun 2021 adalah Rp.45.834.343.279,- atau 99,95%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%\ Rencana\ Capaian\ Input} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya pada triwulan IV tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,00	EFISIEN
2.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	0,00	EFISIEN
3.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	0,00	EFISIEN
4.	KIE Obat dan Makanan Aman	0,06	EFISIEN
5.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,00	EFISIEN
6.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	1,00	EFISIEN
7.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0,00	EFISIEN
8.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	0,00	EFISIEN
9.	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	0,00	EFISIEN
10.	Desa Pangan Aman	0,00	EFISIEN
11.	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0,00	EFISIEN
12.	Sampel Makanan yang Diperiksa	0,15	EFISIEN
13.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	0,01	EFISIEN
14.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	0,00	EFISIEN
15.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0,05	EFISIEN
16.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	0,04	EFISIEN
17.	Layanan Perkantoran	0,00	EFISIEN

Pada triwulan IV tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 1. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin

rendah ketidakefisienan yang terjadi. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan mempunyai TE tertinggi karena telah dilakukan revisi anggaran untuk efisiensi kegiatan menghasilkan output yang lebih banyak.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Pada triwulan IV tahun 2021 ini evaluasi interim triwulan IV ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 30 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis semua memperoleh capaian "BAIK".
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,62% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya.
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 96,53% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 96,99% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.
    - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 106,84% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
    - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,11% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
    - Capaian indikator sasaran strategis keenam sebesar 97,82% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektiftas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
    - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 105,74% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektlitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya.

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 100,08%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan sebesar 87,78%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 106,21%, dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 102,88% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

3. Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0 sampai 1 (Kegiatan Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan)

4.2. Saran

1. Melakukan analisa secara mendalam terhadap capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang belum mencapai target dengan kriteria cukup. Meminta data data survey secara lengkap kepada Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan meliputi metode survey, lokasi survey dan pertanyaan survey. Selanjutnya menyusun strategi untuk melakukan intervensi agar dapat menaikkan nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di tahun 2022.
2. Melakukan evaluasi secara rutin dan upaya percepatan terhadap pencapaian 7 indikator yang masih belum mencapai target meskipun sudah mendapat kriterian baik.

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA (awal dan revisi)



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Kedua
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama
Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BBPOM di Surabaya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya,08 November 2021

Pihak Kedua
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama
Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		14.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4.36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		15.	*Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB*	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	16.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
		17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		18.	Jumlah desa pangan aman	19
		19.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang optimal	23.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		24.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		27.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 25.156.385.000,-
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 25.370.331.000,-

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Surabaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
5	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.4
6	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92
7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.26
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.7
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.6
12	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88
13	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
15	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83.6
16	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75.64
17	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
18	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
20	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
23	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10
24	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
25	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
26	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	42
27	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.35
28	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
29	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	12
30	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar	55

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp. 45,856,819,000.00

Surabaya,08 November 2021

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	524,561,000
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	300,691,270
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6	83.6	83.6	83.6	125,438,500
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	159,147,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5.	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	124,000,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	168,950,000
		7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	150,000,000
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	90	79,088,500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	58,280,000

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	61.6	8,460,000
		11.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	95.5	627,210,000
		12.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	436,227,000
		13.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	905,832,000
		14.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	4.36	79,088,500
		15.	Persentase *UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB*	-	-	-	20	326,000,000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	16.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91.10	6,600,000,000
		17.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	699,825,000
		18.	Jumlah desa pangan aman	10%	25%	45%	19	1,105,512,000
		19.	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	25%	60%	12	551,502,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	649,999,500
		21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	459,838,500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65	1,726,049,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabayayang	23.	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	92	25,535,781,000
		24.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BBPOM di Surabaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	91	438.494.344, 50
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat			80			80			80	80	80	80	221.969.340, 85
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			83.6			83.6			83.6	83.6	83.6	84	104.869.155, 50
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			51			51			51	51	51	70	117.445.659, 15
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat										88	88	88	39.543.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												76	112.248.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												83.6	56.500.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												75.64	92.761.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												90	36.279.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan			89			89			89	89	89	89	42.580.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			61.6			61.6			61.6	61.6	61.6	62	8.460.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu			95.5			95.5			95.5	95.5	95.5	98	556.712.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			51			51			51	51	51	55	284.695.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan			57			57			57	57	57	60	549.627.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.35	36.279.000, 00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar			20			20			20	20	20	55	129.682.000, 00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			91.10			91.10			91.10	91.10	91.10	91.10	6.520.985.000, 00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman			10			20			45	45	45	42	440.980.000, 00
19.	Jumlah desa pangan aman			10			25			45	45	45	19	598.928.000, 00
20.	Jumlah pasar aman berbasis komunitas			15			25			60	60	60	12	315.280.000, 00
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15			30			50	50	50	100	543.363.500, 00
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15			30			50	50	50	100	339.415.000, 00
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			25			35			50	50	50	65	1.102.868.000, 00
24.	Indeks RB UPT												84.7	25.048.814.000, 00
25.	Nilai AKIP UPT												82.6	1.073.835.000, 00
26.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	10.532.000, 00
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												78	6.745.274.000, 00

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				Anggaran
				B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24.	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	77	223,191,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	80.5	7,577,548,000
		27.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2	80,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	94	25,050,000
		29.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	332,780,000

Surabaya, 6 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2			2			2	2	2	2.26	275.440.000, 00
29.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			30			50			70	70	70	93.4	6.480.000, 00
30.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT			88			88			88	88	88	92	6.480.000, 00
Total														45.856.819.000, 00

Surabaya, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5030575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2021.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA

I Made Bagus Gerametta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,31
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

I Made Bagus Gerametta

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	Rp	2.328.970.000	2.328.734.875	99,99
		Output : Jumlah laboratorium	laboratorium	1	1	100,00
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	297.768.000	297.761.881	100,00
		Output : Jumlah laporan penyidikan	laporan	3	3	100,00
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Input : Dana	Rp	815.452.000	815.443.250	100,00
		Output : Jumlah sertifikat yang diselesaikan	sertifikat	7	7	100,00
4	KIE Obat dan Makanan Aman	Input : Dana	Rp	6.613.746.000	6.612.965.598	99,99
		Output : Jumlah KIE	KIE	20.950	22.157	105,76
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	1.190.225.000	1.189.217.099	99,92
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100,00
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	112.248.000	112.215.525	99,97
		Output : Jumlah layanan publikasi	layanan	26	52	200,00
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Input : Dana	Rp	4.848.966.000	4.847.263.757	99,96
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100,00
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	Input : Dana	Rp	805.100.000	805.093.998	100,00
		Output : Jumlah perkara	perkara	6	6	100,00
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	440.980.000	440.481.882	99,89
		Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	42	42	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
10	Desa Pangan Aman	Input : Dana	Rp	598.928.000	598.816.365	99,98
		Output : Jumlah desa yang diintervensi	desa	19	19	100,00
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	315.280.000	315.098.939	99,94
		Output : Jumlah pasar yang diintervensi	pasar	12	12	100,00
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	678.830.000	678.337.655	99,93
		Output : jumlah sampel makanan	sampel	863	996	115,41
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	1.086.727.000	1.086.242.645	99,96
		Output : jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	sampel	1.796	1.820	101,34
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	Input : Dana	Rp	39.543.000	39.483.750	99,85
		Output : jumlah sampel pangan fortifikasi	sampel	130	130	100,00
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	292.775.000	292.761.400	100,00
		Output : Jumlah sarana produksi	sarana	330	346	104,85
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	592.587.000	592.486.065	99,98
		Output : Jumlah sarana distribusi	sarana	621	648	104,35
17	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	24.798.694.000	24.795.834.395	99,99
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	1	100,00

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TRIWULAN II TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	99,99	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	100,00	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	100,00	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
4	KIE Obat dan Makanan Aman	99,99	105,76	1,06	1	EFISIEN	0,06
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	99,92	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99,97	200,00	2,00	1	EFISIEN	1,00
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	99,96	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	100,00	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	99,89	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
10	Desa Pangan Aman	99,98	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	99,94	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	99,93	115,41	1,15	1	EFISIEN	0,15
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	99,96	101,34	1,01	1	EFISIEN	0,01
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	99,85	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	100,00	104,85	1,05	1	EFISIEN	0,05
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	99,98	104,35	1,04	1	EFISIEN	0,04
17	Layanan Perkantoran	99,99	100,00	1,00	1	EFISIEN	0,00

LAMPIRAN 2
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total															RAPK 2020
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS							
													MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	Surabaya	138	Targeted	109	0	2	0	14	107	107	91	3	13	0	0	18	0	109	
		Kabupaten Kediri			14	0	2	0	0	12	12	12	0	0	0	0	2	0	14	
		Kabupaten Jember	20		20	0	0	0	0	20	20	19	1	0	0	0	1	0	20	
		Surabaya	546	Random	408	0	2	0	94	406	406	319	0	85	2	0	89	0	408	
		Kabupaten Kediri			49	0	0	0	0	49	49	49	0	0	0	0	0	0	49	
		Kabupaten Jember	78		78	0	0	0	2	78	78	76	0	2	0	0	2	0	78	
		TOTAL	782		678	0	6	0	110	672	672	566	4	100	2	0	112	0	678	83,48
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Surabaya	154	Targeted	95	0	0	0	10	95	95	82	3	9	1	-	13	-	95	
		Kabupaten Kediri			14	0	0	0	0	14	14	14	-	-	-	-	-	-	14	
		Kabupaten Jember	22		22	0	0	0	5	22	22	16	1	4	1	-	6	-	22	
		Surabaya	359	Random	290	4	0	0	5	286	286	280	1	5	-	-	10	-	290	
		Kabupaten Kediri			33	0	0	0	3	33	33	29	1	2	1	-	4	-	33	
		Kabupaten Jember	52		52	0	0	0	12	52	52	40	-	12	-	-	12	-	52	
		TOTAL	587		506	4	0	0	35	502	502	461	6	32	3	-	45	-	506	91,11
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	51	Targeted	38	0	0	0	0	38	38	38	-	-	-	-	-	-	38	
		Kabupaten Kediri			5	0	0	0	0	5	5	5	-	-	-	-	-	-	5	
		Kabupaten Jember	7		7	0	0	0	1	7	7	6	-	1	-	-	1	-	7	
		Surabaya	120	Random	90	0	0	0	0	90	90	90	-	-	-	-	-	-	90	
		Kabupaten Kediri			11	0	0	0	0	11	11	11	-	-	-	-	-	-	11	
		Kabupaten Jember	17		17	0	0	0	1	17	17	16	-	1	-	-	1	-	17	
		TOTAL	195		168	0	0	0	2	168	168	166	-	2	-	-	2	-	168	98,81
4	Kosmetik	Surabaya	308	Targeted	308	0	0	0	36	308	308	266	6	36	0	0	42	0	308	
		Kabupaten Kediri			28	0	0	0	5	28	28	18	3	7	0	0	10	0	28	
		Kabupaten Jember	44		44	0	0	0	16	44	44	30	0	14	0	0	14	0	44	
		Surabaya	482	Random	482	7	0	0	43	475	475	432	0	42	1	0	50	0	482	
		Kabupaten Kediri			66	0	0	0	7	66	66	62	0	4	0	0	4	0	66	
		Kabupaten Jember	104		104	0	0	0	22	104	104	84	0	20	0	0	20	0	104	
		TOTAL	938		1032	7	0	0	129	1025	1025	892	9	123	1	0	140	0	1032	86,43
	Total Obat		158	Targeted	143	0	4	0	14	139	139	122	4	13	0	0	21	0	143	85,31
	Total Obat Tradisional		176		131	0	0	0	15	131	131	112	4	13	2	-	19	-	131	85,50
	Total Suplemen Kesehatan		58		50	0	0	0	1	50	50	49	-	1	-	-	1	-	50	98,00
	Total Kosmetik		352		380	0	0	0	57	380	380	276	9	57	0	0	66	0	380	72,63
	Surabaya		651	Targeted	550	0	2	0	60	548	548	477	12	58	1	-	73	-	550	86,73
	Kabupaten Kediri		0		61	0	2	0	5	59	59	49	3	7	-	-	12	-	61	80,33
	Kabupaten Jember		93		93	0	0	0	22	93	93	71	2	19	1	-	22	-	93	76,34
	Total Obat		624	Random	535	0	2	0	96	533	533	444	0	87	2	0	91	0	535	82,99
	Total Obat Tradisional		411		375	4	0	0	20	371	371	349	2	19	1	-	26	-	375	93,07
	Total Suplemen Kesehatan		137		118	0	0	0	1	118	118	117	-	1	-	-	1	-	118	99,15
	Total Kosmetik		586		652	7	0	0	72	645	645	578	0	66	1	0	74	0	652	88,65
	Surabaya		1507	Random	1270	11	2	0	142	1257	1.257	1.121	1	132	3	-	149	-	1.270	88,27
	Kabupaten Kediri		0		159	0	0	0	10	159	159	151	1	6	1	-	8	-	159	94,97
	Kabupaten Jember		251		251	0	0	0	37	251	251	216	-	35	-	-	35	-	251	86,06
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos		1758		1680	11	2	0	189	1667	1667	1488	2	173	4	0	192	0	1680	88,57
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos		2502		2384	11	6	0	276	2367	2.367	2.085	19	257	6	-	299	-	2.384	87,46
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	Surabaya	312	Targeted	350	0	0	0	50	350	350	295	41	[redacted]	14	0	55	0	350	84,29
		Kabupaten Kediri			23	0	0	0	0	23	23	21	2		0	0	2	0	23	91,30
		Kabupaten Jember	23		23	0	0	0	3	23	23	20	3		0	0	3	0	23	86,96
		Surabaya	646	Random	646	0	0	0	76	646	646	550	20	70	6	0	96	0	646	85,14
		Kabupaten Kediri			24	0	0	0	0	24	24	23	1	0	0	0	1	0	24	95,83
		Kabupaten Jember	23		23	0	0	0	3	23	23	18	2	3	0	0	5	0	23	78,26
	Total Pangan		335	Targeted	396	0	0	0	53	396	396	336	46	0	14	0	60	0	396	84,85
	Total Pangan		669	Random	693	0	0	0	79	693	693	591	23	73	6	0	102	0	693	85,28
2	Fortifikasi	Surabaya	130	Targeted	130	0	0	0	29	130	130	127	0	[redacted]	3	0	3	0	130	97,69
	Total Pangan		130	Targeted	130	0	0	0	29	130	130	127	0	0	3	0	3	0	130	97,69
	TOTAL PANGAN		1134		1219	0	0	0	161	1219	1219	1054	69	73	23	0	165	0	1219	86,46

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

Indeks Kesadaran Masyarakat Provinsi

No.	Provinsi	Target Indeks	Capaian Indeks	Persentase
1	DKI Jakarta	85	87,12	102,49%
2	Jawa Tengah	75	87,05	116,07%
3	Kepulauan Riau	81	85,12	105,09%
4	DI Yogyakarta	80	84,97	106,21%
5	Kalimantan Timur	84	83,27	99,13%
6	Kalimantan Selatan	81	79,08	97,63%
7	Jawa Barat	71	78,33	110,32%
8	Maluku	77	78,32	101,71%
9	Sulawesi Utara	81	78,15	96,48%
10	Riau	78	78,13	100,17%
11	Gorontalo	82	78,01	95,13%
12	Kalimantan Barat	81	77,95	96,23%
13	Bengkulu	86	77,62	90,26%
14	Jambi	75	77,54	103,39%
15	Kalimantan Utara	82	77,42	94,41%
16	Sumatera Selatan	81	76,47	94,41%
17	Bali	72	76,28	105,94%
18	Papua Barat	82	75,27	91,79%
19	Aceh	75	75,21	100,28%
20	Sulawesi Tenggara	75	74,77	99,69%
21	Kalimantan Tengah	71	74,69	105,20%
22	Sulawesi Tengah	78	74,34	95,31%
23	Sumatera Barat	84	74,28	88,43%
24	Banten	89	74,26	83,44%
25	Sulawesi Selatan	79	74,11	93,81%
26	Sumatera Utara	81	74,07	91,44%
27	Jawa Timur	76	73,36	96,53%
28	Papua	64	72,57	113,39%
29	Nusa Tenggara Timur	71	72,11	101,56%
30	Kepulauan Bangka Belitung	77	71,56	92,94%
31	Lampung	85	71,20	83,76%
32	Sulawesi Barat	68	67,81	99,72%
33	Nusa Tenggara Barat	77	66,83	86,79%
34	Maluku Utara	74	65,31	88,26%
	Nasional	**77**	**77,64**	**100,83%**

3. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Unit Penyelenggara KBP	Jumlah KBP	Jumlah Responden	Capaian Indeks	Target	Persen Capaian	Gap Indeks	Total skor
1	BBPOM di Jakarta	31	1086	**86.7**	86.6	**100.1%**	0.1	11
2	BBPOM di Makassar	11	133	**87.3**	83.5	**104.6%**	3.8	11
3	BBPOM di Semarang	13	304	**92.1**	87.1	**105.8%**	5.0	11
4	BBPOM di Pekanbaru	9	145	**90.6**	88.2	**102.7%**	2.4	10
5	BBPOM di Serang	8	634	**86.7**	84.7	**102.3%**	2.0	10
6	BBPOM di Surabaya	10	202	**84.5**	83.6	**101.1%**	0.9	10
7	BBPOM di Samarinda	9	36	**94.3**	84.6	**111.5%**	9.7	9
8	BBPOM di Yogyakarta	6	281	**90.1**	86.6	**104.0%**	3.5	9
9	BPOM di Ambon	10	81	**89.3**	88.5	**100.9%**	0.8	9
10	BBPOM di Banda Aceh	4	38	**94.1**	91.1	**103.3%**	3.0	8
11	BBPOM di Bandar Lampung	8	162	**90.2**	91.1	**99.0%**	-0.9	8
12	BBPOM di Bandung	12	180	**86.4**	91.1	**94.8%**	-4.7	8
13	BBPOM di Banjarmasin	7	56	**92.3**	91.1	**101.4%**	1.2	8
14	BBPOM di Denpasar	16	193	**85.8**	90.7	**94.6%**	-4.9	8
15	BBPOM di Padang	4	58	**85.4**	82.7	**103.3%**	2.7	8
16	BPOM di Gorontalo	5	34	**96.5**	85.6	**112.7%**	10.9	8
17	BPOM di Kupang	8	53	**90.7**	90.2	**100.6%**	0.5	8
18	BPOM di Mamuju	5	38	**93.4**	91.1	**102.5%**	2.3	8
19	BBPOM di Palembang	8	193	**83.5**	88.8	**94.0%**	-5.3	7
20	BPOM di Batam	4	67	**88.8**	88.0	**100.9%**	0.8	7
21	BBPOM di Jayapura	5	37	**90.2**	91.1	**99.1%**	-0.9	6
22	BBPOM di Pontianak	6	42	**91.0**	91.1	**99.9%**	-0.1	6
23	BPOM di Jambi	3	21	**91.0**	87.8	**103.7%**	3.2	6
24	BPOM di Kendari	3	21	**85.5**	80.3	**106.5%**	5.2	6
25	BBPOM di Mataram	6	100	**85.1**	87.6	**97.2%**	-2.5	5
26	BBPOM di Medan	6	80	**82.6**	91.1	**90.7%**	-8.5	5
27	BBPOM di Palangkaraya	4	31	**82.1**	88.7	**92.5%**	-6.6	5
28	BPOM di Bengkulu	4	41	**88.8**	91.1	**97.5%**	-2.3	5
29	BPOM di Palu	4	53	**82.5**	90.0	**91.7%**	-7.5	5
30	BPOM di Manokwari	4	30	**75.8**	87.2	**87.0%**	-11.4	4
31	BPOM di Pangkalpinang	2	37	**84.5**	91.1	**92.8%**	-6.6	4
32	BBPOM di Manado	1	17	**85.6**	89.9	**95.2%**	-4.3	3
33	BPOM di Sofifi	3	23	**83.1**	91.1	**91.2%**	-8.0	3

4. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No.	PROVINSI	TARGET INDEKS	CAPAIAN INDEKS	PERSENTASE
1	Gorontalo	64,53	77,43	119,99%
2	Jambi	70,38	76,31	108,43%
3	Kepulauan Riau	70,27	74,65	106,23%
4	DKI Jakarta	74,98	73,80	98,43%
5	Kalimantan Selatan	78,33	73,03	93,23%
6	Jawa Tengah	70,73	72,56	102,59%
7	Kalimantan Timur	72,65	72,18	99,35%
8	Sumatera Selatan	75,68	71,83	94,91%
9	Bengkulu	78,38	71,51	91,24%
10	Sulawesi Selatan	75,50	70,84	93,83%
11	Aceh	70,84	70,16	99,04%
12	Nusa Tenggara Timur	68,12	70,01	102,77%
13	Sulawesi Utara	83,37	69,70	83,60%
14	Kalimantan Barat	68,07	69,52	102,13%
15	Kalimantan Utara	78,45	69,37	88,43%
16	Kalimantan Tengah	63,25	69,17	109,36%
17	Jawa Barat	77,83	69,12	88,81%
18	Kepulauan Bangka Belitung	71,03	69,06	97,23%
19	Papua Barat	68,53	68,87	100,50%
20	Bali	70,56	68,09	96,50%
21	Maluku	69,86	68,02	97,37%
22	Sumatera Barat	73,87	67,93	91,96%
23	Banten	81,07	67,69	83,50%
24	Sulawesi Tenggara	68,36	67,20	98,30%
25	Lampung	79,54	66,78	83,96%
26	Jawa Timur	75,64	66,55	87,98%
27	Sulawesi Tengah	67,56	65,65	97,17%
28	Riau	64,28	65,14	101,34%
29	DI Yogyakarta	78,17	64,71	82,78%
30	Sumatera Utara	71,00	64,67	91,08%
31	Papua	64,76	61,70	95,27%
32	Nusa Tenggara Barat	76,24	61,64	80,85%
33	Sulawesi Barat	74,00	61,50	83,11%
34	Maluku Utara	62,55	59,95	95,84%
	Nasional	**72,00**	**68,89**	**95,68%**

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (91,72)



6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	91	92	21	27	10	18	468	459			
		Obat Tradisional/	17	14	3	3	1	4	45	45			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	5	5			
		Kosmetik	0	0	0	0	1	1	9	9			
		Pangan	30	29	7	7	6	12	278	275			
		Total	138	135	31	37	18	35	805	793	793	805	98,51
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	2	2	2	2	0	0	14	14			
		Obat Tradisional/	2	4	0	2	4	2	36	34			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	1	1			
		Kosmetik	0	0	2	0	1	3	12	12			
		Pangan	1	1	0	0	0	0	7	7			
		Total	5	7	4	4	5	5	70	68	68	70	97,14
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/	2	2	2	2	2	2	22	22			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	20	20			
		Pangan	0	0	0	0	0	0	2	2			
		Total	2	2	2	2	2	2	44	44	44	44	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	0	0	0	0	25	25			
		Obat Tradisional/	2	1	2	2	0	2	12	12			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	2	2	1	1	6	6			
		Pangan	0	0	0	0	0	0	10	10			
		Total	3	2	4	4	1	3	53	53	53	53	100,00
TOTAL			**148**	**146**	**41**	**47**	**26**	**45**	**972**	**958**			98,91

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	91	26	27	27	18	9	458	252			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	14	5	3	1	4	3	45	24			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	5	2			
		Kosmetik	0	0	0	0	1	0	6	5			
		Pangan	28	17	5	21	12	9	270	194			
		Total	133	48	35	49	35	21	784	477	477	784	60,84
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pangan	3	2	1	1	9	6	13	9			
		Total	3	2	1	1	9	6	13	9	9	13	69,23
TOTAL			**136**	**50**	**36**	**50**	**44**	**27**	**797**	**486**			65,04

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT		November			Desember			Total			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Surabaya	676	816	816	800	802	802	796	9122	9122	8973			
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Surabaya	665	904	904	904	885	885	885	8919	8919	8919			
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Surabaya	79	45	45	45	6	6	6	609	609	609			
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Surabaya	0	3	0	0	0	3	3	15	15	15			
Total			Surabaya	1420	1768	1765	1749	1693	1696	1690	18665	18665	18516	18516	18665	99,20

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	39	2	2	0	5	4	1	1	1	0	15	12	3				
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	27	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	3	1				
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0				
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	20	8				
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3				
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				
10	Industri Kosmetik	94	0	0	0	0	0	0	1	0	1	35	22	13				
11	Industri Pangan	679	12	4	8	0	0	0	0	0	0	214	126	88				
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	12570	1	1	0	0	0	0	0	0	0	44	12	32				
	Surabaya	13536	15	7	8	6	5	1	2	1	1	348	200	148	348	200	148	57,47

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	280	55	3	0	3	0	0	0	0	0	0	55	25	30				
2	Apotek	3012	40	0	0	0	0	0	0	1	0	1	41	18	23				
3	Toko Obat	93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3				
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	24	4				
5	Rumah Sakit (RS)	315	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4				
6	Puskemas	677	326	40	38	2	11	7	4	1	1	0	326	269	57				
7	Klinik	721	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	10				
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	737	31	3	0	3	0	0	0	0	0	0	36	18	18				
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	737	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	5				
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	422	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	16	7				
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	558	78	0	0	0	1	0	1	14	6	8	90	61	29				
	Surabaya	7580	621	46	38	8	12	7	5	16	7	9	641	451	190	641	451	190	70,36

11. Indeks Pelayanan Publik (4,52/Pelayanan Prima)

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	*Baseline* 2020	Target 2021	IPP 2021	Keterangan
1	Balai Besar POM di Denpasar	4.52	4.55	4.66	*Pelayanan Prima*
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4.29	4.40	4.57	*Pelayanan Prima*
3	Balai Besar POM di Jakarta	4.00	4.20	4.54	*Pelayanan Prima*
4	Balai Besar POM di Surabaya	4.11	4.35	4.52	*Pelayanan Prima*
5	Balai Besar POM di Serang	4.25	4.35	4.5	Sangat Baik
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4.17	4.35	4.5	Sangat Baik
7	Balai Besar POM di Bandung	4.20	4.35	4.48	Sangat Baik
8	Balai POM di Ambon	4.22	4.35	4.46	Sangat Baik
9	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.10	4.20	4.45	Sangat Baik

12. PERSENTASE UMKM BINAAN YANG MEMENUHI KETENTUAN CPPOB (50,90)

	MK	Total
Sarana UMKM	173	340
Sarana Gempur Jatim	24	47
Total	197	387
Persen %	**50,90**	

13. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (91,51)



Rabu, 5 Januari 2022 15:27:08

total responden : 383

Indeks Total

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	88.32	3.53
Pemahaman	91.72	3.67
Manfaat	93.67	3.75
Minat	87.34	3.49
Indeks	91.51	3.66

Indeks Kegiatan

Average Values of	Skala 100	Skala 4
Televisi	83.93	3.36
Radio	84.78	3.39
Brosur, majalah, koran	84.42	3.38
Videotron / Billboard	84.46	3.38
Transportasi Umum	86.61	3.46
Bioskop	85.94	3.44
Medio Online	85.36	3.41
Talkshow Televisi	86.44	3.46
Talkshow Radio	81.25	3.25
CFD	82.76	3.31
Pameran	85.61	3.42
Penyuluhan	89.09	3.56
Media Sosial	88.36	3.53
Virtual	89.2	3.57

14. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN (42 sekolah)

	Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												Total progres	CAPAIAN RAPK		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septembe r	Oktober	November	Desember		RAPK s.d TW IV (Jan-Des)		
																	Pembilang	Penyebut	Realisasi (progres)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	Feb - april	20,00			7,50	5,00	2,50	2,50	0,00	2,50					20,00			
2	Sosialisasi keamanan pangan	Feb - Juni	5,00					2,06		3,21	0,16		0,05			5,48			
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	April - Juni	15,00						6,92	2,31	3,46	2,31				15,00			
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	April - Nov	10,00								8,46		1,54			10,00			
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya	Juli - Sept														0,00			
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	Juli - Sept	5,00							0,77	0,96	1,54	1,73			5,00			
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	Juli - Sept	10,00							0,77	1,15	2,69	5,38			10,00			
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	Agt- Nop	25,00									0,60	8,93	14,29	1,19	25,00			
7	Pengawalan	Okt - Des	10,00									10,00				10,00			
																0,00			
																0,00			
																0,00			
	Total skor		100	0	0	7,5	5	4,56	9,42	7,05	16,70	17,13	17,63	14,29	1	100,48	0		100,00

15. JUMLAH DESA PANGAN AMAN (19 desa)

	Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												Total	CAPAIAN RAPK		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		RAPK s.d TW IV (Jan-Des)		
																	Pembilang	Penyebut	Realisasi
1	Adokasi Kelembagaan Desa	Jan-april	20,00			7,50	5	2,5	2,5		2,5					20			
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	Jan-april	5,00					5								5			
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	April - Juli	15,00						8,08		2,31	4,62				15,00			
4	Bimtek Komunitas	Mei - Okt	15,00								5,00	8,33		1,67		15,00			
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	Juni - Nov	10,00										6,67	3,33		10,00			
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	Mei-Nov	10,00										6,67	3,33		10,00			
7	Monitoring dan Evaluasi	Nov - Des	15,00												15	15			
8	Pengawalan tahun sebelumnya	Juni - Des	10,00												10	10			
	Total		100	0	0	7,50	5	7,5	10,58	0	9,81	12,95	13,33	8,33	25	100,00	0		100

16. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (12 pasar)

	Kegiatan	Target Pelaksanaan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian DJA)												Total	CAPAIAN RAPK		
				Januari	Februar	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustu	Septembe	Oktobe	Novem	Desemb		RAPK s.d TW IV (Jan-Des)		
																	Pembilang	Penyebut	Realisasi
1	Adokasi	Jan - Apr	20,00			7,50	5	2,5	2,50		2,5					20,00			
2	Survey Pasar	Jan	5,00			1,875		1,875	0,63			0,625				5,00			
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	Apr - mei	15,00					9,375	3,75			1,875				15,00			
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	Apr	20,00							18,33				1,67		20,00			
5	Penyuluhan	Juni - Juli	5,00									5				5,00			
6	Kampanye	Juni - Juli	5,00									5				5,00			
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	Sept - Okt	20,00											18,33	1,67	20,00			
8	Lomba Pasar Aman	Des	10,00												10	10,00			
	Total		**100**	**0**	**0**	**9,38**	**5**	**13,75**	**6,88**	**18,33**	**2,5**	**12,5**	**0**	**20,00**	**11,67**	**100,00**	**0**		**100**

17. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	KOMODITI	UPT	Oktober				November				Desember				Total				TW IV
			Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling) Screen reader	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	
1	Obat	Surabaya	39	26	27	27	35	26	4	4	9	8	7	7	513	461	517	517	
		Kabupaten Kediri	8	6	4	4	9	8	6	6	2	2	2	2	61	57	63	63	
		Kabupaten Jember	10	8	9	9	20	16	9	9	5	5	2	2	98	90	98	98	
2	Obat tradisional	Surabaya	43	34	2	2	9	9	-	-	-	-	-	-	381	356	385	385	
		Kabupaten Kediri	8	6	4	4	5	5	4	4	3	3	-	-	47	43	47	47	
		Kabupaten Jember	14	12	7	7	6	6	7	7	11	9	4	4	74	66	74	74	
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	16	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	128	91	128	128	
		Kabupaten Kediri	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	16	10	16	16	
		Kabupaten Jember	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	1	1	24	18	24	24	
4	Kosmetika	Surabaya	4	4	37	37	49	48	20	20	65	60	4	4	783	764	790	790	
		Kabupaten Kediri	2	1	8	8	16	15	8	8	11	9	2	2	94	89	94	94	
		Kabupaten Jember	8	8	14	14	17	17	14	14	26	25	6	6	148	147	148	148	
		Surabaya	102	75	66	66	94	83	24	24	74	68	11	11	1.805	1.672	1.820	1.820	72,93
		Kabupaten Kediri	21	15	17	17	31	29	19	19	17	15	4	4	218	199	220	220	134,15
		Kabupaten Jember	34	30	32	32	46	41	32	32	45	42	13	13	344	321	344	344	133,33
	Total Obat	TOTAL SURABAYA	157	120	115	115	171	153	75	75	136	125	28	28	2.367	2.192	2.384	2.384	96,30
5	Pangan	Surabaya	115	115	93	93	31	31	20	20	11	3	11	11	996	980	996	996	85,91
		Kabupaten Kediri	15	15	4	4	2	2	1	1	-	-	-	-	47	47	47	47	123,68
		Kabupaten Jember	10	10	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	46	46	46	46	131,43
	Total Pangan		140	140	98	98	35	35	23	23	11	3	11	11	1.089	1.073	1.089	1.089	83,43
6	Fortifikasi	Surabaya	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	100,00
		Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Fortifikasi		20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	100,00
	Total Makanan SURABAYA		160	160	98	98	35	35	23	23	11	3	11	11	1.219	1.203	1.219	1.219	99,34
	TOTAL OBAT DAN MAKANAN		317	280	213	213	206	188	98	98	147	128	39	39	3.586	3.395	3.603	3.603	

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN

UPT		Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Surabaya	Surabaya	SPDP	6	16	2		1,00		0,15	15,00%	68,73%	100,00%	68,73%
		Tahap I			2	3	0,67	0,73	0,4	32,28%			
		P21			1	3	0,33	0,59	0,3	16,05%			
		Tahap II			1	10	0,17	0,45	0,15	5,39%			
		Total	6	16	6	16							

19. INDEKS RB UPT (84,64)

PENILAIAN			Nilai	%	Keterangan
A.	PROSES (60)				
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,19	89,81%	MS
	II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	6,25	89,29%	MS
	III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	9,75	97,50%	MS
	IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	10,00	100,00%	MS
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	13,94	92,92%	MS
	VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	10,00	100,00%	MS
TOTAL PENGUNGKIT			57,12		MS
B.	HASIL (40)				
	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	18,91	95%	MS
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	13,91	92,75%	MS
		2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	18,10	91%	MS
		1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (15)	18,10	90,50%	MS
TOTAL HASIL			37,01		
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			94,14		

Sehubungan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian BB/BPOM dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut (0,834) menghasilkan Indeks RB BBPOM di Surabaya sebesar **84,64** sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.

20. NILAI AKIP UPT (82,79)

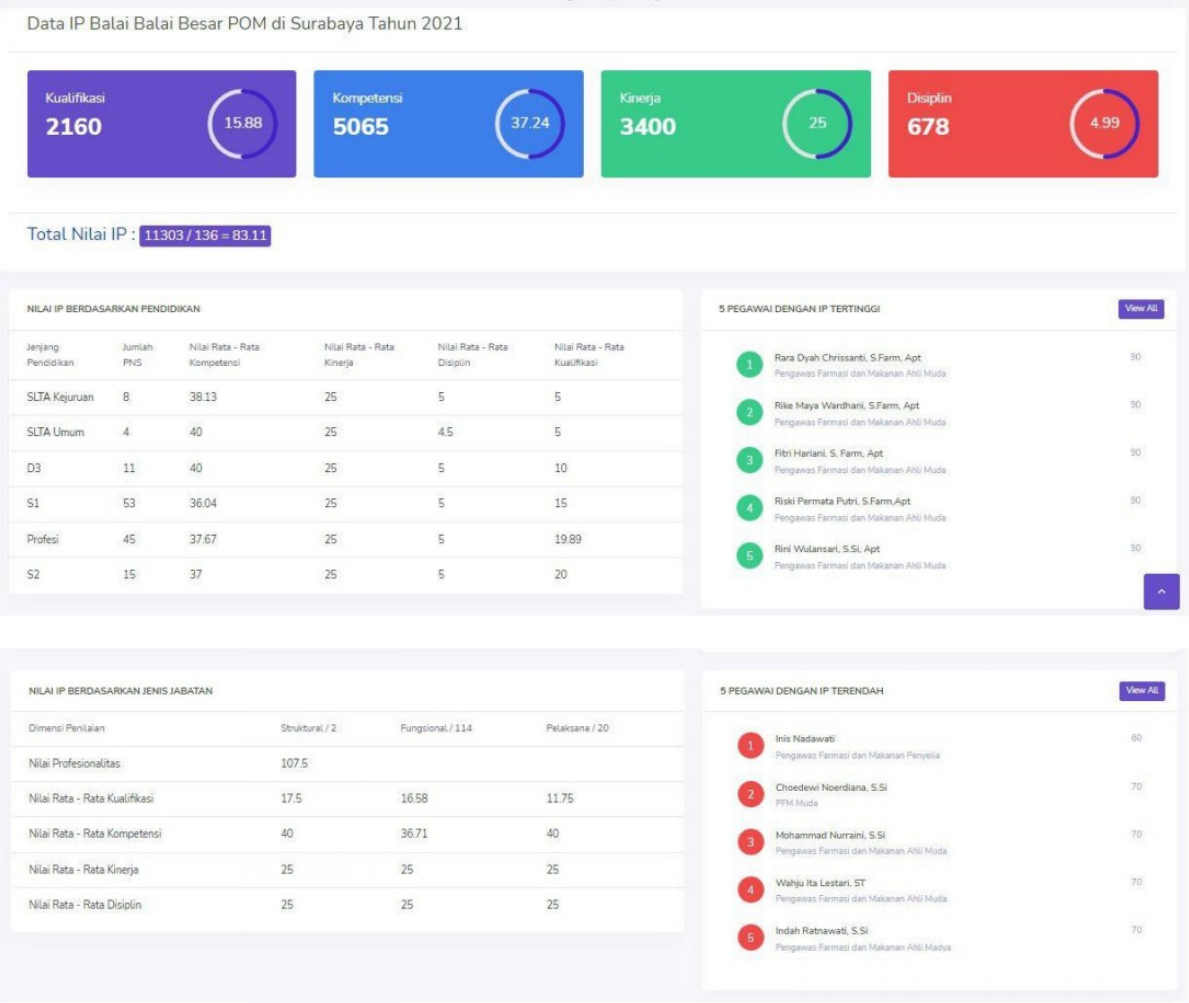
BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

-2-

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	27,08	28,54
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,00	21,25
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,30	13,30
d.	Evaluasi Internal	10	7,64	7,64
e.	Capaian Kinerja	20	13,09	12,06
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**81,11**	**82,79**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**	**A**

21. INDEKS PROFESIONALITAS ASN UPT (83,11)



Data IP Balai Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
2160	5065	3400	678
15.88	37.24	25	4.99

Total Nilai IP : 11303 / 136 = 83.11

NILAI IP BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Nilai Rata - Rata Kompetensi	Nilai Rata - Rata Kinerja	Nilai Rata - Rata Disiplin	Nilai Rata - Rata Kualifikasi
SLTA Kejuruan	8	38.13	25	5	5
SLTA Umum	4	40	25	4.5	5
D3	11	40	25	5	10
S1	53	36.04	25	5	15
Profesi	45	37.67	25	5	19.89
S2	15	37	25	5	20

5 PEGAWAI DENGAN IP TERTINGGI — View All

1. Rara Dyah Chrissanti, S.Farm, Apt — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 90
2. Rike Maya Wardhani, S.Farm, Apt — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 90
3. Fitri Hariani, S. Farm, Apt — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 90
4. Riski Permata Putri, S.Farm,Apt — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 90
5. Rini Wulansari, S.Si, Apt — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 90

NILAI IP BERDASARKAN JENIS JABATAN

Dimensi Penilaian	Struktural / 2	Fungsional / 114	Pelaksana / 20
Nilai Profesionalitas	107.5		
Nilai Rata - Rata Kualifikasi	17.5	16.58	11.75
Nilai Rata - Rata Kompetensi	40	36.71	40
Nilai Rata - Rata Kinerja	25	25	25
Nilai Rata - Rata Disiplin	25	25	25

5 PEGAWAI DENGAN IP TERENDAH — View All

1. Inis Nadawati — Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia — 60
2. Choedewi Noerdiana, S.Si — PFM Muda — 70
3. Mohammad Nurraini, S.Si — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 70
4. Wahju Ita Lestari, ST — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda — 70
5. Indah Ratnawati, S.Si — Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya — 70

22. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP (80,1)

LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : **Balai Besar POM di Surabaya**
Tanggal Penilaian : **3 Januari 2021**
Nama Tim Penilai : **1. Dwi Damayanti,S.Si.,Apt.,M.Farm**
2. Febriana Sari, SSi., MSi

Hasil Penilaian :

No	Bidang/Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1.	Kimia Obat dan Nappza	66,80	71,53	72,65
2.	Kimia OTSK	78,81		
3.	Kimia Kosmetik	86,11		
4.	Kimia Pangan	76,00		
5.	Mikrobiologi dan Biologi Molekular	84,68	90,91	83,65
Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)		80,80	81,22	78,15
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium		80,1		

23. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (2,48)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	136	136	136
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_aktif	118	100	108
total_individu_login	118	100	108
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	26,02941176	22,05882353	23,82352941
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	26,02941176	22,05882353	23,82352941
Perhitungan (%)	92,05882353	84,11764706	87,64705882
Perhitungan per TW	88,88120503		
Nilai Indeks	3		

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Akses BCC	60	60	60
Login BCC	40	40	40
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	99,58333333		
Nilai Indeks Per TW	3		

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	80	78	101
Perhitungan	86,33333333		
Nilai Indeks	2		

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	TW IV
Jumlah Upload	32
Jumlah Viewer	15988
Perhitungan Rata2 Berita	10,66666667
Perhitungan Rata2 Pengunjung	499,625
Indeks Per TW	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	86	86	86
Jumlah Verifikasi	86	86	86
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	99,94172494		
Nilai Indeks per TW	3		
Komposit SPIMKER (20%)	0,6		

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Tahun	Triwulan	% Sarana	% Sampling	% Pengujian	Rata-rata	Nilai Indeks	Komposit SIPT (80%)
2021	1	55,35	0	0	55,35	1	0,8
2021	2	94,4	84,22	0	89,31	2	1,6
2021	3	96,98	91,84	70,09	86,30333333	2	1,6
2021	4	130,97	78,81	43,95	84,57666667	2	1,6

Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi	
TW I	3
TW II	3
TW III	3
TW IV	2,75

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC	
TW I	1,4
TW II	2,2
TW III	2,2
TW IV	2,2

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optima	
TW I	2,2
TW II	2,6
TW III	2,6
TW IV	2,475

24. NILAI KINERJA ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)				
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai EKA
1	135	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	68.19	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	95.68	100.00	100.00	99.87	0.00	95.00	92.11	95%	96.95	99.95	99.41	100.00	1.23	86.47
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5								
				Nilai Akhir	5.00	3.41	5.00	10.00	7.60	5.00	5.00	14.35	10.00	17.00	4.99	0.00	4.75								
				Nilai Aspek	89.40			98.75				98.89				95.00									

Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai EKA tw 4, per 10 Januari 2022 = 86,47 x 60% = 51,88
Nilai IKPA = 96,95 x 40% = 38,78

Nilai Kinerja Anggaran = 51,88 + 38,78 = 90,66

25. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN UPT (100%)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	88,27	97,00	438.494.345	438.298.907	99,96	0,97	-0,03	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,14	106,43	221.977.410	221.816.413	99,93	1,07	0,07	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	86,73	103,25	104.869.156	104.822.415	99,96	1,03	0,03	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70	84,29	120,41	117.437.590	117.352.414	99,93	1,21	0,21	FALSE
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88	97,69	111,01	39.543.000	39.483.750	99,85	1,11	0,11	100 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan ama	76	73,36	96,53	112.248.000	112.215.525	99,97	0,97	-0,03	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pe	83,6	84,5	101,08	56.500.000	56.500.000	100,00	1,01	0,01	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	75,64	66,55	87,98	239.914.000	239.612.209	99,87	0,88	-0,12	75 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	91,72	101,91	38.858.000	38.853.625	99,99	1,02	0,02	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	89	98,91	111,13	43.412.000	43.410.000	100,00	1,11	0,11	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pema	62	65,04	104,90	22.214.000	22.214.000	100,00	1,05	0,05	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,2	101,22	551.554.000	551.554.000	100,00	1,01	0,01	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57,47	104,49	283.983.000	283.971.400	100,00	1,04	0,04	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	70,36	117,27	535.753.000	535.652.065	99,98	1,17	0,17	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4,35	4,52	103,91	38.858.000	38.853.625	99,99	1,04	0,04	100 %
16	Persentase UMKM Binaan yang Memenuhi Ketentuan CPPOB	55	50,9	92,55	129.682.000	129.682.000	100,00	0,93	-0,07	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,51	100,45	6.373.832.000	6.373.353.389	99,99	1,00	0,00	100 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42	42	100,00	440.980.000	440.481.882	99,89	1,00	0,00	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00	598.928.000	598.816.365	99,98	1,00	0,00	100 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	12	100,00	315.280.000	315.098.939	99,94	1,00	0,00	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	96,36	96,36	543.363.500	543.121.323	99,96	0,96	-0,04	75 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,34	99,34	339.415.000	339.168.828	99,93	0,99	-0,01	75 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	68,73	105,74	1.102.868.000	1.102.855.879	100,00	1,06	0,06	100 %
24	Indeks RB UPT	84,7	84,64	99,93	25.063.587.000	25.046.527.254	99,93	1,00	0,00	75 %
25	Nilai AKIP UPT	82,6	82,79	100,23	1.027.592.000	1.026.623.898	99,91	1,00	0,00	100 %
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85	83,11	97,78	12.982.000	12.980.601	99,99	0,98	-0,02	75 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar	78	80,1	102,69	6.725.274.000	6.723.641.686	99,98	1,03	0,03	100 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,26	2,48	109,73	330.940.000	330.900.887	99,99	1,10	0,10	100 %
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,4	90,66	97,07	3.240.000	3.240.000	100,00	0,97	-0,03	75 %
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	100	108,70	3.240.000	3.240.000	100,00	1,09	0,09	100 %
	TOTAL			102,64	45.856.819.000	45.834.343.279	99,95	1,03	0,03	100 %